

Katalog : 4102004.3376

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KOTA TEGAL 2022



**BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA TEGAL**

<https://tegal.bps.go.id>

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KOTA TEGAL 2022



INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT 2022 KOTA TEGAL

ISBN :
Nomor Publikasi : 33760.2212
Katalog : 4102004.3376
Ukuran Buku : 18,2 x 25,7 cm
Jumlah Halaman : xii + 72 halaman

Naskah:

Badan Pusat Statistik Kota Tegal

Gambar Kulit:

Badan Pusat Statistik Kota Tegal

Diterbitkan Oleh:

©Badan Pusat Statistik Kota Tegal

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengkomunikasikan, Dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

TIM PENYUSUN

Pengarah : Drs. Agustinus Hariyanto, M.M

Penanggung Jawab : Misbakhul Ulum, S.ST

Penulis : Misbakhul Ulum, S.ST

Retabulasi : Misbakhul Ulum, S.ST

<https://tegalkota.bps.go.id>

KATA PENGANTAR

Publikasi **Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Tegal 2022** merupakan publikasi tahunan yang menyajikan data tentang tingkat perkembangan kesejahteraan rakyat dari waktu ke waktu. Istilah kesejahteraan mencakup berbagai aspek kehidupan yang sangat luas dan tidak semuanya dapat diukur. Data yang digunakan bersumber dari data primer hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS), yang meliputi Survei Sosial Ekonomi Nasional dan Survei Angkatan Kerja Nasional, serta data dari instansi lain di luar BPS.

Publikasi ini menyajikan statistik dan indikator kesejahteraan rakyat yang diharapkan dapat digunakan sebagai dasar perencanaan maupun evaluasi terhadap upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat. Statistik yang dicakup antara lain meliputi aspek kependudukan, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, taraf dan pola konsumsi, perumahan, kemiskinan, serta sosial lainnya. Dengan demikian, Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Tegal 2022 diharapkan mampu menjembatani antara penyedia dan pengguna data.

Kepada semua pihak yang telah secara aktif berperan dalam penyusunan publikasi ini, disampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Saran untuk perbaikan publikasi sangat diharapkan demi penyajian yang lebih baik di masa mendatang.

Tegal, Desember 2022
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
Kota Tegal,



Drs. Agustinus Hariyanto, M.M

<https://tegalkota.bps.go.id>

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	V
DAFTAR ISI	VII
DAFTAR TABEL.....	IX
DAFTAR GAMBAR.....	XI
BAB 1. KEPENDUDUKAN	1
1.1. Jumlah, Laju Pertumbuhan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin.....	4
1.2. Persebaran dan Kepadatan Penduduk	5
1.3. Angka Beban Ketergantungan.....	7
1.4. Wanita Menurut Usia Perkawinan Pertama.....	9
1.5. Penggunaan Alat/Cara KB.....	10
BAB 2. KESEHATAN DAN GIZI.....	16
2.1. Derajat dan Status Kesehatan Penduduk	16
2.2. Tingkat Imunitas dan Gizi Balita.....	18
2.3. Pemanfaatan Fasilitas Tenaga Kesehatan.....	20
BAB 3. PENDIDIKAN	24
3.1. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS)	25
3.2. Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan.....	27
3.3. Angka Partisipasi Sekolah	28
3.4. Angka Partisipasi Murni.....	29
BAB 4. KETENAGAKERJAAN.....	32
4.1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).....	35
4.2. Lapangan Pekerjaan.....	37
4.2. Status Pekerjaan	39
BAB 5. TARAF DAN POLA KONSUMSI	44
5.1. Pengeluaran Rumah Tangga.....	44

5.2. Konsumsi Energi dan Protein	47
BAB 6. PERUMAHAN.....	52
6.1. Kualitas Rumah Tinggal.....	53
6.2. Fasilitas Rumah Tinggal.....	55
6.3. Status Kepemilikan Rumah Tinggal	56
BAB 7. KEMISKINAN.....	60
7.1. Perkembangan Kemiskinan.....	60
7.2. Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan, Indeks Keparahan Kemiskinan.....	62
KESIMPULAN	66
DAFTAR PUSTAKA.....	70

<https://tegalkota.bps.go.id>

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk menurut Kecamatan di Kota Tegal, 2022	4
Tabel 1.2. Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin menurut Kecamatan di Kota Tegal, 2022	4
Tabel 1.3. Kepadatan Penduduk menurut Kecamatan di Kota Tegal, 2020	6
Tabel 1.4. Komposisi Penduduk dan Angka Beban Ketergantungan di Kota Tegal, 2018-2022	8
Tabel 1.5. Persentase Wanita Berumur 10 Tahun ke Atas menurut Usia Perkawinan Pertama di Kota Tegal, 2018-2022	9
Tabel 1.6. Persentase Wanita Kawin Berumur 15-49 tahun menurut Alat/Cara KB yang Sedang Digunakan di Kota Tegal, 2018-2022	12
Tabel 2.1. Persentase Kunjungan Penduduk yang Berobat Jalan dalam Satu Bulan Terakhir Menurut Tempat/Cara Berobat di Kota Tegal, 2018-2022.....	19
Tabel 2.2. Persentase Kunjungan Penduduk yang Berobat Jalan dalam Satu Bulan Terakhir Menurut Tempat/Cara Berobat di Kota Tegal, 2018-2022	20
Tabel 2.3. Persentase Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Kawin menurut Penolong Kelahiran Anak Terakhir di Kota Tegal, 2018-2022	21
Tabel 3.1. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas menurut Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kota Tegal, 2018-2022	27
Tabel 3.2. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Usia Sekolah dan Jenis Kelamin di Kota Tegal, 2021-2022 (persen)	28
Tabel 3.3. Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kota Tegal, 2021-2022 (persen)	29
Tabel 4.1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Tegal, 2018-2022	36

Tabel 4.2. Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Kelompok Lapangan Usaha di Kota Tegal, 2018 – 2022	38
Tabel 4.3. Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama di Kota Tegal, 2018 – 2022	39
Tabel 6.1 Persentase Rumah Tangga Menurut Beberapa Indikator Kualitas Perumahan di Kota Tegal, 2018 – 2022	54
Tabel 6.2 Persentase Rumah Tangga Menurut Beberapa Fasilitas Perumahan di Kota Tegal, 2018 – 2022	55

<https://tegalkota.bps.go.id>

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Persentase Wilayah dan Persebaran Penduduk menurut Kecamatan di Kota Tegal, 2022	6
Gambar 1.2. Persentase Wanita Kawin 15-49 Tahun yang Sedang Menggunakan Alat/Cara KB di Kota Tegal, 2018-2022	11
Gambar 2.1. Angka Kesakitan Kota Tegal, 2018-2022 (persen).....	17
Gambar 3.1. Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah di Kota Tegal, 2018-2022 (tahun)	26
Gambar 5.1. Rata-rata Pengeluaran per Kapita sebulan di Kota Tegal, 2018-2022 (Rupiah).....	45
Gambar 5.2 Persentase Pengeluaran menurut Jenis Pengeluaran di Kota Tegal, 2018-2022 (Persen).....	46
Gambar 5.3. Konsumsi Energi (kkal) dan Protein (gram) per Kapita per Hari di Kota Tegal, 2018 – 2022	47
Gambar 6.1. Persentase Rumah Tangga menurut Status Kepemilikan Rumah Tinggal di Kota Tegal, 2018 – 2022	57
Gambar 7.1 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kota Tegal, 2017-2021.	61
Gambar 7.2. Garis Kemiskinan Kota Tegal, 2018-2022 (Rp/Kapita/Bulan)	63
Gambar 7.3. Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Kota Tegal, 2018-2022.....	64

<https://tegalkota.bps.go.id>

KEPENDUDUKAN KOTA TEGAL 2022



136.639 Jiwa



139.142 Jiwa

Jumlah Penduduk
275.781 Jiwa

SEX RATIO
101,83



65 Tahun +
6,28 %



15 - 64 Tahun
70,39 %



0 - 14 Tahun
23,33 %

ANGKA BEBAN KETERGANTUNGAN **42,07 %**



KEPADATAN
PENDUDUK **7.028** Jiwa/km²

<https://tegalkota.bps.go.id>



Bab 1.

KEPENDUDUKAN

Penduduk merupakan faktor penting dalam suatu pembangunan. Selain sebagai subjek, penduduk juga berperan sebagai objek dalam pembangunan. Oleh karena itu, perhatian terhadap penduduk bukan hanya pada sisi jumlah, tetapi juga pada sisi kualitas. Penduduk yang berkualitas merupakan modal bagi pembangunan dan diharapkan mampu dalam mengatasi berbagai dampak dari dinamika kependudukan.

Penduduk dapat menjadi nilai tambah sekaligus beban bagi pemerintah apabila tidak dapat ditangani dengan baik. Banyaknya jumlah penduduk bisa memperkuat faktor produksi dan menjadi potensi ekonomi apabila memang penduduknya berkualitas. Di sisi lain penambahan penduduk yang tidak dapat dikendalikan akan menjadi bom waktu yang dapat menimbulkan berbagai permasalahan hingga bermuara pada terhambatnya pembangunan. Masalah kesenjangan sosial, penyediaan kebutuhan pokok, pendidikan, kesehatan, ketersediaan lapangan pekerjaan bahkan hingga ke perumahan akan menjadi beberapa permasalahan yang ditimbulkan akibat penduduk.

Selain tingkat pertumbuhan penduduk, masalah komposisi penduduk dan ketimpangan distribusi penduduk juga menjadi masalah serius yang harus segera ditangani oleh pemerintah. Kebijakan pemerintah terkait masalah kependudukan baik dalam hal kuantitas maupun kualitas penduduk harus terus dilaksanakan dalam upaya memperbaiki kualitas hidup masyarakat sehingga kesejahteraan hidup masyarakat dapat diingkatkan.

1.1. Jumlah, Laju Pertumbuhan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin

Jumlah penduduk Kota Tegal pada tahun 2021 berdasarkan hasil proyeksi Sensus Penduduk 2020 tercatat sebanyak 275.781 jiwa yang terdiri atas 139.142 jiwa penduduk laki-laki dan 136.639 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan tahun 2020, jumlah penduduk tahun 2021 mengalami laju pertumbuhan sebesar 0,71 persen. Kecamatan dengan laju pertumbuhan terbesar adalah Kecamatan Margadana, sedangkan Kecamatan Tegal Barat merupakan kecamatan dengan laju pertumbuhan terkecil.

Tabel 1.1. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk menurut Kecamatan di Kota Tegal, 2021

Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)		Laju Pertumbuhan (persen)
	2010	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)
Tegal Selatan	67.207	67.805	0,89
Tegal Timur	80.707	80.883	0,22
Tegal Barat	66.924	66.964	0,06
Margadana	58.987	60.129	1,94
Kota Tegal	273.825	275.781	0,71

Sumber: Kota Tegal Dalam Angka, 2022

Tabel 1.2. Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin menurut Kecamatan di Kota Tegal, 2021

Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)		Rasio Jenis Kelamin
	Laki-Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Tegal Selatan	34.438	33.367	103,21
Tegal Timur	40.464	40.419	100,11
Tegal Barat	33.692	33.272	101,26
Margadana	30.548	29.581	103,27
Kota Tegal	139.142	136.639	101,83

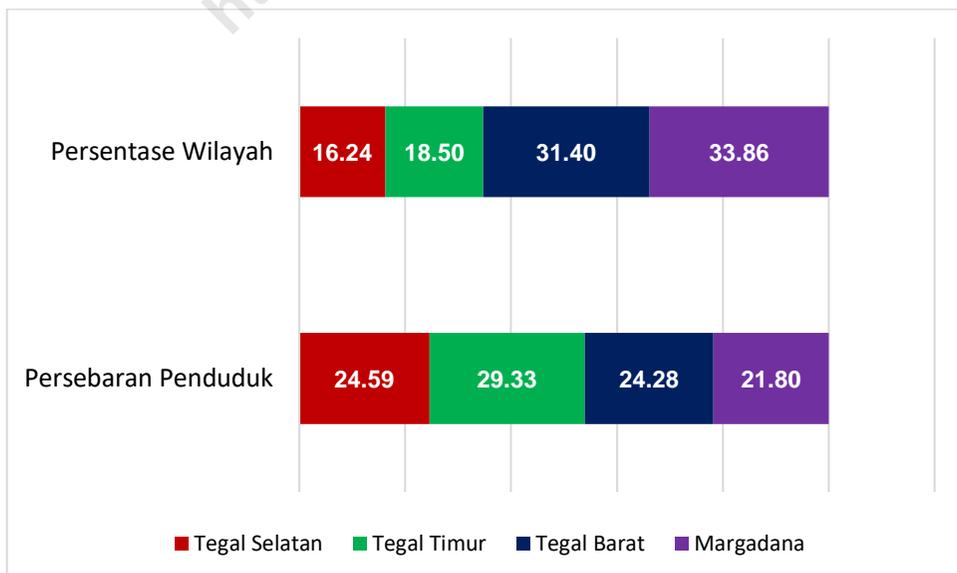
Sumber: Kota Tegal Dalam Angka, 2022

Bila dilihat komposisi penduduk menurut jenis kelamin penduduk laki-laki dan perempuan, rasio jenis kelamin penduduk Kota Tegal pada tahun 2021 sebesar 101,83. Ini berarti bahwa setiap 101 penduduk laki-laki terdapat 100 penduduk perempuan. Dengan kata lain, jumlah penduduk laki-laki di Kota Tegal lebih banyak daripada jumlah penduduk perempuan. Berdasarkan kecamatan, rasio jenis kelamin di semua kecamatan berada di atas 100 yang berarti jumlah penduduk laki-laki di masing-masing kecamatan lebih banyak daripada penduduk perempuan.

1.2. Persebaran dan Kepadatan Penduduk

Salah satu persoalan yang terkait dengan kependudukan yang masih harus dihadapi oleh Indonesia yaitu masalah ketimpangan distribusi penduduk. Distribusi penduduk yang tidak merata menimbulkan masalah pada kepadatan penduduk dan tekanan penduduk di suatu wilayah. Ada beberapa wilayah yang mempunyai jumlah penduduk yang sangat besar, di wilayah lain masih ada wilayah yang hanya dihuni oleh jumlah penduduk yang relatif sedikit. Hal ini sangat berpengaruh pada kondisi masyarakat setempat.

Gambar 1.1. Persentase Wilayah dan Persebaran Penduduk menurut Kecamatan di Kota Tegal, 2021



Sumber: Kota Tegal Dalam Angka, 2022

Di satu sisi, wilayah dengan jumlah penduduk yang besar akan dihadapkan pada persoalan meningkatnya jumlah pengangguran karena tidak memadainya penyediaan lapangan pekerjaan, permasalahan kebutuhan lahan untuk pemukiman, serta tidak memadainya akses fasilitas pendidikan dan kesehatan serta masalah-masalah sosial lainnya. Di sisi lainnya, wilayah dengan jumlah penduduk yang relatif sedikit akan memunculkan persoalan optimalisasi sumber daya alam terkait dengan kekurangan tenaga kerja padahal wilayah tersebut memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah.

Gambar 1.1 memberikan gambaran persebaran penduduk menurut kecamatan di Kota Tegal. Tergambar adanya konsentrasi tempat tinggal penduduk yang cenderung mendekati pusat perekonomian. Sebagai gambaran, Kecamatan Tegal Timur sebagai pusat pemerintahan Kota Tegal dengan luas wilayah sebesar 18,50 persen dari wilayah total Kota Tegal ditempati oleh 29,33 persen penduduk. Kemudian Kecamatan Margadana dengan luas wilayah 33,87 persen namun hanya dihuni oleh 21,80 persen jumlah penduduk.

Tabel 1.3. Kepadatan Penduduk menurut Kecamatan di Kota Tegal, 2021

Kecamatan	Persentase Penduduk	Kepadatan (Jiwa per Km ²)
(1)	(2)	(3)
Tegal Selatan	24.59	10.628
Tegal Timur	29.33	11.156
Tegal Barat	24.28	5.435
Margadana	21.80	4.524
Kota Tegal	100,00	7.028

Sumber: Kota Tegal Dalam Angka, 2022

Melihat kepadatan penduduk berdasarkan Kabupaten/Kota se Jawa Tengah kondisi tahun 2021 Kota Tegal menempati posisi keempat sebagai wilayah terpadat setelah Kota Surakarta, Kota Magelang, dan Kota Pekalongan dengan

kepadatan penduduk sebesar 7.028 jiwa/km². Jika dilihat kepadatan penduduk berdasarkan kecamatan, terlihat Kecamatan Tegal Timur memiliki kepadatan penduduk terbesar yaitu 11.156 jiwa/km². Hal ini seperti yang dikemukakan sebelumnya bahwa Kecamatan Tegal Timur merupakan pusat pemerintahan dan juga pusat perekonomian Kota Tegal sehingga tidak mengherankan jika memiliki kepadatan penduduk yang tinggi. Selanjutnya Kecamatan Tegal Selatan mempunyai kepadatan penduduk sebesar 10.628 jiwa/km², Kecamatan Tegal Barat dengan kepadatan penduduk sebesar 5.435 jiwa/km², dan kepadatan terkecil, Kecamatan Margadana sebesar 4.524 jiwa/km².

1.3. Angka Beban Ketergantungan

Angka Beban Ketergantungan (*Dependency ratio*) merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tinggi persentase angka beban ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Persentase angka beban ketergantungan yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Dampak keberhasilan pembangunan kependudukan juga dapat dilihat pada perubahan komposisi penduduk menurut umur seperti tercermin pada semakin rendahnya angka beban ketergantungan. Hal ini disebabkan dengan semakin kecilnya angka beban ketergantungan akan memberikan kesempatan yang semakin besar bagi penduduk usia produktif untuk meningkatkan kualitas dirinya.

Pada tahun 2021, Angka Beban Ketergantungan Kota Tegal sebesar 42,07 persen, dengan kata lain setiap 100 penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun) harus menanggung sebanyak 42 orang penduduk yang tidak produktif (usia di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun). Rasio ketergantungan yang cenderung menurun belakangan ini diperkirakan akan mencapai titik terendah pada periode 2020-2030. Pada periode itu akan terdapat peluang lebih besar untuk melakukan investasi manusia guna mendorong produksi. Namun perlu diketahui bahwa di satu sisi mereka dapat mendorong ekonomi untuk tumbuh jika sebagian besar dari

mereka bekerja tetapi di sisi lain mereka dapat menciptakan instabilitas sosial dan politik jika diantara mereka banyak yang tidak bekerja. Mereka dikatakan usia produktif tapi tidak dapat termanfaatkan tenaganya karena tidak terserap di pasar kerja.

Tabel 1.4. Komposisi Penduduk dan Angka Beban Ketergantungan di Kota Tegal, 2018-2021

Tahun	Komposisi Penduduk			Angka Beban Ketergantungan
	0-14	15-64	65+	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2017	24,29	69,90	5,81	43,07
2018	24,03	69,97	6,01	42,93
2019	23,86	69,99	6,15	42,88
2020	23,56	70,46	5,98	41,93
2021	23,33	70,39	6,28	42,07

Sumber: Proyeksi Sensus Penduduk 2020

Menurunnya angka beban ketergantungan diikuti pula dengan menurunnya proporsi penduduk usia muda (0-14 tahun) sebagai dampak dari menurunnya laju pertumbuhan penduduk. Tabel 1.4 menunjukkan bahwa pada penduduk usia muda cenderung menurun, tahun 2021 tercatat sebesar 23,33 persen. Hal ini menunjukkan salah satu wujud keberhasilan program pemerintah untuk menekan laju pertumbuhan penduduk.

Struktur umur penduduk Kota Tegal pada tahun 2021 masih didominasi oleh penduduk usia produktif yang mencapai 70,39 persen. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk usia produktif di Kota Tegal menjadi sangat potensial sebagai modal dasar yang besar untuk pembangunan. Potensi yang besar dari penduduk usia produktif harus diimbangi dengan ekonomi yang cukup dan akhlak yang baik serta fasilitas yang mendukung misalnya fasilitas pendidikan dan kesehatan sehingga penduduk usia produktif akan menjadi penduduk yang berkualitas yang mendukung pembangunan. Sementara itu, proporsi penduduk usia lanjut (65 tahun ke atas) pada tahun 2021 mencapai 6,28 persen.

1.4. Wanita Menurut Usia Perkawinan Pertama

Salah satu persoalan penduduk yang dapat memicu tingginya pertambahan jumlah penduduk yaitu tingginya angka kelahiran di suatu daerah. Banyaknya kelahiran yang terjadi pada seorang wanita dapat dipengaruhi oleh masa reproduksinya. Semakin panjang masa reproduksi seorang wanita, kemungkinan semakin banyak anak yang dilahirkan. Semakin muda usia seseorang saat melaksanakan perkawinan pertama maka akan semakin panjang masa reproduksinya.

Tabel 1.5. Persentase Wanita Berumur 10 Tahun ke Atas menurut Usia Perkawinan Pertama di Kota Tegal, 2017-2021

Tahun	Umur Perkawinan Pertama				
	< 17	17-18	19-24	25+	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2017	15,03	13,38	50,54	21,05	100,00
2018	12,17	17,01	50,35	20,48	100,00
2019	12,89	17,47	49,04	20,60	100,00
2020	12,18	17,89	50,30	19,62	100,00
2021	13,62	17,08	49,76	19,54	100,00

Sumber: Hasil Susenas 2021

Terdapat beberapa sumber mengenai batasan usia minimal seorang wanita untuk melakukan perkawinan pertama. Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pada pasal 7 ayat (1) syarat menikah untuk perempuan harus sudah berusia minimal 16 tahun, sedangkan menurut Undang-Undang Perlindungan Anak usia minimal untuk menikah yaitu sudah berumur 18 tahun. Sementara itu, menurut Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) usia pernikahan pertama bagi seseorang idealnya adalah 21-25 tahun.

Hasil Susenas tahun 2021 menunjukkan bahwa usia perkawinan wanita wanita yang melakukan perkawinan pertama pada pada usia di bawah 17 tahun

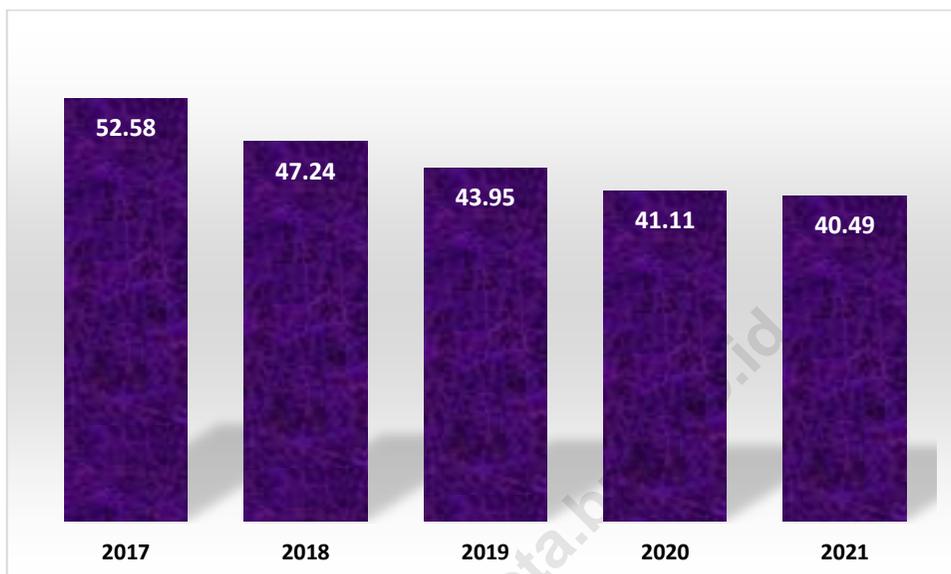
mengalami kenaikan. Pada kelompok usia di bawah 17 tahun, persentase wanita usia 10 tahun ke atas yang pernah kawin pada kelompok usia naik dari 12,18 persen pada tahun 2020 menjadi 13,62 persen pada tahun 2021. Sebaliknya persentase Wanita usia 10 tahun ke atas yang pernah kawin pada kelompok usia 17-18 tahun mengalami penurunan dari 17,89 persen pada tahun 2020 menjadi 17,08 persen pada tahun 2021. Perkawinan pada usia di bawah 17 tahun dan 17-18 tahun dapat mengindikasikan berbagai hal diantaranya pergaulan bebas, putus sekolah, pemahaman akan kesehatan reproduksi yang rendah, maupun pengaruh budaya.

Pada tahun 2021, usia perkawinan pertama bergeser ke usia 19-24 tahun. Pada usia ini mengalami penurunan dari 50,30 persen pada 2020 menjadi 49,76 persen pada tahun 2021. Peningkatan usia perkawinan pertama pada umur 19-24 tahun merupakan hal cukup baik karena pada usia tersebut organ reproduksi wanita sudah cukup siap dan matang, selain itu pada umur tersebut secara umum seseorang sudah tamat pendidikan setara SMA atau strata satu perguruan tinggi. Perkawinan pertama pada umur 19-24 tahun juga sudah sesuai anjuran BKKBN sehingga diharapkan dapat membantu suksesnya program keluarga berencana.

1.5. Penggunaan Alat/Cara KB

Program Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk, mengurangi angka kelahiran anak dan kematian ibu. Program KB dilakukan dengan penggunaan alat kontrasepsi/KB yang berbagai jenis/macamnya. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) selaku instansi pemerintah yang menangani program KB ini mengharapkan cakupan akseptor KB terus meningkat. Terutama untuk kepesertaan KB dengan Metode Kontrasepsi Terutama untuk kepesertaan KB dengan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) seperti IUD dan Implant. Dengan cakupan KB yang meningkat, diharapkan laju pertumbuhan penduduk bisa dikendalikan lebih baik lagi.

Gambar 1.2. Persentase Wanita Kawin 15-49 Tahun yang Sedang Menggunakan Alat/Cara KB di Kota Tegal, 2017-2021



Sumber: Hasil Susenas 2021

Berdasarkan hasil Susenas, persentase wanita kawin berumur 15-49 yang sedang menggunakan alat/cara KB cenderung mengalami penurunan selama kurun waktu 2017-2021. Tahun 2017 tercatat sebesar 52,58 persen wanita kawin 15-59 tahun yang sedang menggunakan alat/cara KB. Kondisi ini cenderung terus menurun hingga pada tahun 2021 menjadi 40,49 persen. Ada beberapa alasan yang membuat perempuan enggan menggunakan KB, yaitu alasan fertilitas, menentang untuk memakai, alasan agama, kurangnya pengetahuan, dan takut efek samping alat/cara KB. Oleh karena itu, perlu adanya dukungan dari berbagai pihak untuk menyukseskan program dan gerakan KB.

Seseorang mempunyai pilihan untuk menggunakan jenis alat/cara KB tertentu. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain faktor keamanan, frekuensi pemakaian dan efek samping, terjangkau harganya, cara penggunaan yang dianggap paling praktis, efisien, minim resiko kegagalan dan resiko efek samping terhadap kesehatan pemakai dan memberikan kenyamanan bagi penggunaannya.

Berbagai macam alat/cara KB digunakan oleh pasangan usia subur Kota Tegal namun yang paling banyak peminatnya adalah penggunaan alat KB suntikan

dan pil yang bersifat jangka pendek. Pil dan suntik termasuk alat KB Non-MKJP (tidak termasuk Metode Kontrasepsi Jangka Panjang) yang rawan putus dalam penggunaannya. Penggunaan metode suntikan menjadi persentase terbesar penggunaan alat KB kemudian diikuti penggunaan pil KB. Pada tahun 2022 penggunaan suntikan mencapai 48,23 persen, kondisi ini meningkat bila dibandingkan tahun 2020 yang mencapai 40,66 persen. Penggunaan pil KB mencapai 16,34 persen, kondisi ini menurun bila dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 23,82 persen.

Tabel 1.6. Persentase Wanita Kawin Berumur 15-49 tahun menurut Alat/Cara KB yang Sedang Digunakan di Kota Tegal, 2018-2022

Alat/Cara KB	2018	2019	2020	2021	2022 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
MOW/MOP	10,84	9,45	5,27	7,81	7,81
IUD/AKDR/Spiral	9,99	6,34	11,14	14,78	14,78
Suntik	52,18	53,74	40,66	48,23	48,23
Susuk KB	7,53	10,34	12,33	12,07	12,07
Pil KB	15,72	14,17	23,82	16,34	16,34
Kondom/Karet KB	1,94	3,60	3,60	0,78	0,78
Tradisional	1,81	2,36	3,18	0,00	0,00

Sumber: *) Hasil Susenas 2021

Metode Kontrasepsi jangka panjang yang paling banyak digunakan adalah IUD/AKDR/Spiral Selama kurun waktu 2018-2022 persentase penggunaannya cenderung semakin meningkat, hingga tahun 2022 mencapai 14,78 persen. Penggunaan alat/cara KB jangka panjang lainnya diantaranya seperti susuk KB 12,07 persen dan MOW/MOP mencapai 7,81 persen.

<https://tegalkota.bps.go.id>

KESEHATAN KOTA TEGAL 2022

Baduta yang
mendapatkan ASI

98,46%



Angka Kesakitan

10,68 %

BALITA Imunisasi
Lengkap

69,07 %



100 % Perempuan Pernah
Kawin Berumur 15-49 Th
yang pernah melahirkan
dengan penolong
persalinan adalah
TENAGA KESEHATAN



<https://tegalkota.bps.go.id>



Bab 2.

KESEHATAN DAN GIZI

Derajat kesehatan merupakan indikator penting untuk menggambarkan mutu pembangunan manusia suatu wilayah. Semakin sehat kondisi suatu masyarakat, maka akan semakin mendukung proses dan dinamika pembangunan ekonomi suatu negara/wilayah. Derajat kesehatan yang tinggi secara tidak langsung juga dapat meningkatkan tingkat produktivitas di suatu wilayah.

Pemerintah telah berupaya melalui program-program pembangunan yang telah dilakukan diantaranya meningkatkan akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan berkualitas, merata serta terjangkau, yaitu dengan memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi penduduk miskin; menyediakan sumber daya kesehatan yang kompeten dan mendistribusikan tenaga kesehatan secara merata ke seluruh wilayah, meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan melalui pembangunan puskesmas, rumah sakit; polindes dan posyandu serta menyediakan obat-obatan yang terjangkau oleh masyarakat.

2.1. Derajat dan Status Kesehatan Penduduk

Kondisi sehat secara holistik bukan saja kondisi sehat secara fisik melainkan juga spiritual dan sosial dalam bermasyarakat. Untuk menciptakan kondisi sehat seperti ini diperlukan suatu keharmonisan dalam menjaga kesehatan tubuh. Menurut Hendrik L. Blumm seorang profesor emeritus administrasi kesehatan dan perencanaan di *University of California*, terdapat 4 faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat, yaitu: faktor perilaku, lingkungan, keturunan dan pelayanan kesehatan. Faktor keturunan merupakan faktor yang paling sulit dalam mengatasinya jika penyakit sudah diderita, yang terbaik adalah

pengecahan yang dilakukan sebelum penyakit secara keturunan ini muncul. Tiga faktor lain dapat diupayakan oleh pemerintah dan masyarakat dalam meningkatkan kesehatan masyarakat antara lain semakin baik dan semakin mudah akses pelayanan kesehatan bagi semua kelompok masyarakat, perilaku hidup sehat oleh masyarakat luas dan disertai semakin baiknya kondisi sosial-ekonomi masyarakat dalam memberikan dukungan peningkatan kesehatan lingkungan.

Gambar 2.1. Angka Kesakitan Kota Tegal, 2018-2022 (persen)



Sumber: Hasil Susenas 2022

Merujuk pada konsep yang diterapkan oleh BPS dalam Susenas, morbiditas (angka kesakitan) menunjukkan adanya gangguan/ keluhan kesehatan yang mengakibatkan terganggunya aktivitas sehari-hari baik dalam melakukan pekerjaan, bersekolah, mengurus rumah tangga maupun melakukan aktivitas lainnya. Pada umumnya keluhan kesehatan yang mengindikasikan adanya suatu penyakit yang biasa dialami oleh penduduk adalah panas, batuk, pilek, asma/napas sesak, diare, sakit kepala berulang, sakit gigi, campak, dll. Semakin banyak penduduk yang mengalami gangguan kesehatan berarti semakin rendah derajat

kesehatan di wilayah tersebut dan menunjukkan angka kesakitan yang tinggi di wilayah tersebut (penduduknya banyak yang mengalami sakit).

Dari hasil Susenas diatas, dapat dilihat pada tahun 2022 menunjukkan angka kesakitan penduduk Kota Tegal mencapai 10,68 persen. Angka kesakitan pada tahun 2022 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir angka kesakitan tertinggi terjadi pada tahun 2018 yang mencapai 23,56 persen. Pada tahun 2022 terjadi kenaikan berarti ada upaya pekerjaan rumah dari pemerintah daerah setempat telah bersinergi dengan pemerintah daerah dan juga masyarakat untuk bersama-sama memahami pentingnya menjaga kesehatan supaya angka kesakitan dapat ditekan dan meningkat kembali.

2.2. Tingkat Pemberian ASI Balita

Kesehatan ibu dan balita sangat menentukan kelangsungan dan kualitas hidup di masa yang akan datang. Secara biologis dan psikologis antara ibu dan balita sangat dekat, karena hubungan antara keduanya sangat erat sejak dalam kandungan hingga dilahirkan dan diberi ASI. Kesehatan balita merupakan salah satu indikator yang mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Balita yang sehat merupakan aset yang besar dalam kelangsungan masa depan bangsa.

Air Susu Ibu (ASI) adalah makanan terbaik bagi bayi sebagai sumber nutrisi yang paling sesuai yang berguna untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi. ASI memberikan manfaat pada bayi karena mudah dicerna apabila ketika pencernaannya belum begitu sempurna (dibawah umur 6 bulan). Selain membantu pencernaan, ASI mengandung zat kekebalan yang memberikan perlindungan terhadap berbagai penyakit.

Hasil Susenas 2021 menunjukkan bahwa sebesar 98,46 persen anak berusia kurang dari 2 tahun di Kota Tegal pernah mendapat ASI. Rata-rata anakdisusui selama 11,06 bulan. Banyak faktor yang menyebabkan seorang ibu menghentikan pemberian ASI kepada anaknya, salah satunya adalah ibu tersebut harus melakukan aktifitas pekerjaan untuk membantu menopang

ekonomi keluarga dan anak ditinggal di rumah dan digantikan dengan susu formula.

Jika dilihat dari table 2.1 menunjukkan bahwa persentase lamanya pemberian ASI di Kota Tegal, bayi laki-laki lebih lama dibandingkan bayi perempuan. Sementara Kepala Rumah Tangga dengan Pendidikan tamat SMP ke atas mendominasi lamanya pemberian ASI dibanding dengan tamat SD ke bawah.

Tabel 2.1 Rata-rata lama pemberian ASI, Tahun 2022

		Lamanya pemberian ASI	
Jenis kelamin	Laki-laki	13.3	
	Perempuan	12.0	
distribusi pengeluaran per kapita level kabupaten/kota		40% terbawah	12.9
		40% menengah	13.7
		20% teratas	10.4
KRT tamat SD ke bawah		12.0	
KRT tamat SMP ke atas		13.1	
Total		12.7	

Sumber: Hasil Susenas 2022

2.3. Pemanfaatan Fasilitas Tenaga Kesehatan

Akses penduduk dalam memanfaatkan tenaga kesehatan dapat dilihat dari ketersediaan/kemudahan mencapai fasilitas/tempat dan tenaga kesehatan sebagai rujukan penduduk jika mengalami keluhan sakit hingga harus pergi berobat. Dari informasi tersebut dapat teridentifikasi berbagai masalah yang dihadapi penduduk dalam mengakses dan memanfaatkan fasilitas dan pelayanan kesehatan. Beberapa faktor yang menjadi pertimbangan penduduk adalah jarak tempat tinggal dengan letak sarana pelayanan kesehatan, kualitas pelayanan, sosial-ekonomi penduduk yaitu kemampuan penduduk untuk membiayai pengobatannya serta jenis pelayanan kesehatan.

Pada umumnya pemanfaatan fasilitas kesehatan oleh penduduk sangat erat terkait dengan kondisi sosial ekonomi penduduk dan kondisi wilayah tempat tinggal mereka berada. Tampak perbedaan kualitas kesehatan yang nyata antara

penduduk diperdesaan dengan penduduk perkotaan ini dapat disebabkan oleh perbedaan ketersediaan dan jarak menuju ke fasilitas pelayanan kesehatan tersebut, ditambah lagi perilaku penduduk itu sendiri.

Tabel 2.2. Persentase Kunjungan Penduduk yang Berobat Jalan dalam Satu Bulan Terakhir Menurut Tempat/Cara Berobat di Kota Tegal, 2018-2022

Tempat Berobat	2018	2019	2020	2021	2022 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
RS Pemerintah	7,03	3,30	4,60	6,04	6,04
RS Swasta	6,30	7,48	10,16	12,41	12,41
Praktek Dokter/Bidan	23,85	26,32	25,87	29,94	29,94
Klinik/Praktek dokter bersama	11,52	16,81	12,48	20,20	20,20
Puskesmas/Pustu	55,76	54,85	54,13	27,11	27,11
UKBM**)	2,69	0,12	2,55	1,82	1,82
Tradisional/Alternatif	0,69	0,25	0,93	2,45	2,45
Lainnya	0,00	0,00	0,27	1,39	1,39

*) Sumber: Hasil Susenas 2021

**) UKBM: Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat yang meliputi Poskesdes, Polindes, Posyandu, Balai Pengobatan

Apabila kita melihat pada tabel diatas, mayoritas penduduk Kota Tegal pada tahun 2022 lebih banyak melakukan kunjungan pelayanan kesehatan ke Puskesmas, hal ini dibuktikan dengan besarnya persentase kunjungan selama periode tahun 2018-2022. Sarana kesehatan selanjutnya yang paling banyak dikunjungi adalah praktek dokter/bidan (29,94 persen), dan Klinik/prakter dokter bersama (20,20 persen). Sementara itu, kunjungan ke rumah sakit pemerintah pada tahun 2022 menunjukkan adanya peningkatan dibandingkan 2 tahun sebelumnya. Persentase kunjungan ke rumah sakit pemerintah pada tahun 2022 sebesar 6,04 persen meningkat dari tahun 2020 yang tercatat sebesar 4,60 persen. Sementara kunjungan ke rumah sakit swasta juga mengalami peningkatan, peningkatan ini terlihat selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2018 sebesar 7,03 persen terus menerus meningkat sampa pada tahun 2022 menjadi 12,41 persen. Pada tahun 2022 sebanyak 1,82 persen penduduk yang mengalami keluhan kesehatan berobat ke UKBM.

Penolong kelahiran secara langsung sangat memengaruhi derajat kesehatan ibu dan anak pada tahun-tahun pasca kelahiran. Proses persalinan akan lebih aman jika dilakukan oleh tenaga kesehatan (dokter atau bidan atau tenaga paramedis lainnya) dan tenaga non kesehatan yang sudah terlatih dibandingkan dengan tenaga non kesehatan yang sifatnya masih tradisional seperti dukun bersalin. Hal ini untuk memperkecil resiko kematian maternal, jika kemungkinan komplikasi akibat adanya gangguan kelahiran dapat terdeteksi lebih dini untuk selanjutnya segera ditangani.

Tabel 2.3. Persentase Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Kawin menurut Penolong Kelahiran Anak Terakhir di Kota Tegal, 2018-2022

Penolong Kelahiran	2018	2019	2020	2021	2022 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Dokter Kandungan/Umum	48,63	56,00	58,52	52,98	52,98
Bidan	46,80	44,00	41,48	47,02	47,02
Perawat/Tenaga Kesehatan	2,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Dukun Beranak/Paraji	1,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Lainnya	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00

*) Sumber: Hasil Susenas 2021

Berdasarkan hasil Susenas seperti yang disajikan pada tabel di atas terlihat pada tahun 2019 terjadi pergeseran penolong kelahiran terbesar di Kota Tegal. Pada tahun 2018 sebagian besar kelahiran di Kota Tegal masih ditolong oleh bidan, kemudian mulai tahun 2020 sebagian besar kelahiran ditolong oleh dokter sebanyak 58,52 persen. Pada tahun 2022 kelahiran yang dibantu oleh bidan ada sebesar 47,02 persen. Kondisi ini tentu sangat menggembirakan karena menggambarkan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat Kota Tegal tentang kesehatan, seluruh persalinan sudah dibantu oleh tenaga kesehatan.

PENDIDIKAN KOTA TEGAL 2022



RATA-RATA
LAMA SEKOLAH

13,08 %

ANGKA PARTISIPASI MURNI

SD 97,75

SMP 69,86

SMA 50,01



HARAPAN
LAMA SEKOLAH

9,00 %

<https://tegalkota.bps.go.id>



Bab 3.

PENDIDIKAN

Pendidikan merupakan cikal bakal dari terbentuknya kualitas sumber daya manusia yang handal. Dengan pendidikan yang baik akan melahirkan generasi penerus bangsa yang cerdas dan kompeten. Hal tersebut menunjukkan bahwa pendidikan juga merupakan salah satu faktor penting kewibawaan sebuah negara di mata dunia internasional. Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia. Oleh sebab itu maka setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya. Hak memperoleh pendidikan bagi setiap warga negara tidak memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama, dan gender. Hal tersebut sudah tertuang dalam UUD 1945.

Pendidikan dasar sebagai bagian dari hak asasi manusia dan hak setiap warga negara, maka dalam usaha pemenuhannya harus direncanakan dan dijalankan dengan sebaik mungkin. Pemenuhan atas hak untuk mendapatkan pendidikan dasar yang layak dan bermutu merupakan ukuran keadilan dan pemerataan atas hasil pembangunan. Hal tersebut juga menjadi investasi sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung keberlangsungan pembangunan bangsa. Pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan diharapkan akan mampu menjadikan warga negara Indonesia memiliki kecakapan hidup sehingga mendorong tegaknya pembangunan manusia seutuhnya serta masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila.

Sebagai upaya untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, maka pemerintah pusat dan daerah harus memfasilitasi hak pendidikan bagi tiap warganya. Melalui sekolah yang terjangkau dari sisi pembiayaan, bermutu dari segi layanan dan berkualitas dari sisi pembelajaran. Selain pembiayaan pendidikan yang harus ditanggung pemerintah, sarana dan prasarana, kurikulum, dan sumber belajar dan daya dukung lainnya perlu diupayakan pemerintah.

Beberapa indikator yang akan disajikan di dalam publikasi ini, diantaranya Rata-rata Lama Sekolah, Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan, Angka Partisipasi Sekolah (APS), dan Angka Partisipasi Murni (APM). Indikator-indikator tersebut diolah dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional yang dilakukan BPS.

3.1. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS)

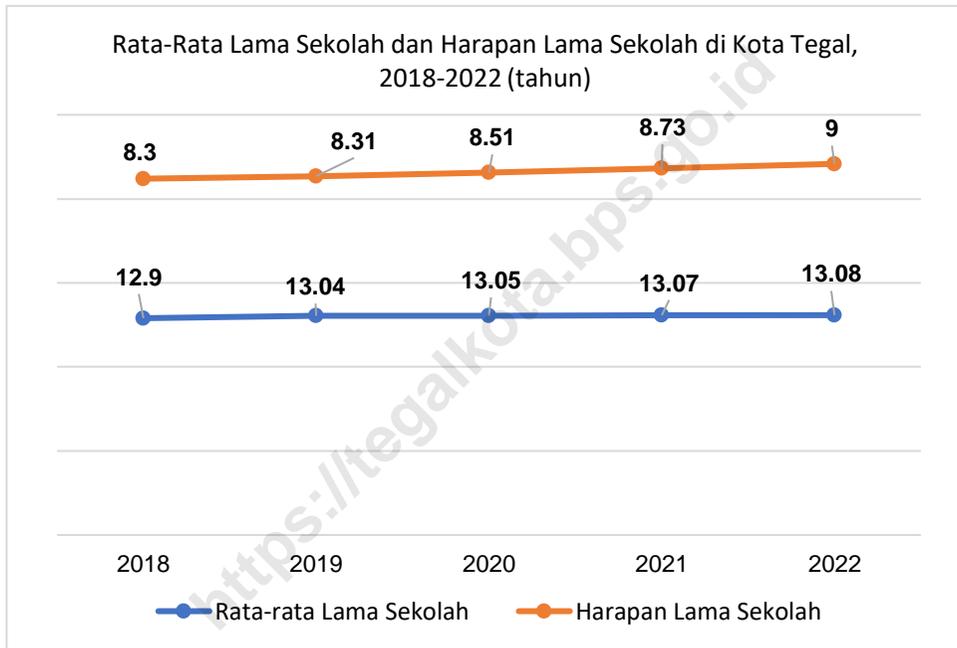
Rata-rata lama sekolah merupakan indikator yang dapat digunakan untuk melihat kualitas penduduk dalam hal mengenyam pendidikan formal. Rata-rata lama sekolah itu sendiri mempunyai pengertian jumlah tahun belajar yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Indikator rata-rata lama sekolah sangat penting karena digunakan sebagai salah satu komponen untuk menghitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM) khususnya di sektor pendidikan. Rata-rata lama sekolah yang digunakan dalam penghitungan IPM diukur dari penduduk berusia 25 tahun ke atas, karena pada usia tersebut proses belajar pada pendidikan formal telah berakhir.

Untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam sektor pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan menempuh berbagai upaya dalam meningkatkan waktu rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas. Salah satu upaya yang dilakukan adalah menekan angka putus sekolah dan meningkatkan jumlah penduduk yang melanjutkan antar jenjang pendidikan. Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, cara paling efektif untuk menaikkan waktu rata-rata lama sekolah bukan dengan menyekolahkan kembali penduduk Indonesia yang telah berusia lanjut, tetapi mengupayakan agar tidak ada lagi peserta didik yang putus sekolah. Upaya lain yang dilakukan yaitu dengan meningkatkan akses dan mutu pendidikan anak usia dini (PAUD), meningkatkan partisipasi sekolah jenjang pendidikan dasar yang bermutu, meningkatkan akses dan mutu pendidikan menengah, meningkatkan akses dan daya saing pendidikan tinggi, serta meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan.

Rata-rata lama sekolah kota tegal tahun 2022 pada penduduk usia 25 tahun ke atas meningkat 0,27 persen dibandingkan tahun sebelumnya 8,73 tahun menjadi 9,00 pada tahun 2022. Artinya, bahwa rata-rata penduduk di Kota Tegal baru mampu menempuh pendidikan sampai dengan kelas 2 SMP atau putus sekolah di kelas 3 SMP. Jika dilihat perkembangan selama 2018-2022, terus

menerus mengalami peningkatan lama sekolah makin lama makin meningkat. Tahun 2022 rata-rata harapan lama sekolah tercatat sebesar 13,08 tahun meningkat 0,01 poin dari tahun 2021 sebesar 13,07. Meningkatnya rata-rata lama sekolah dari tahun ke tahun tak lepas dari upaya pemerintah maupun masyarakat yang menginginkan kualitas pendidikan makin baik.

Gambar 3.1. Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah di Kota Tegal, 2018-2022 (tahun)



Indikator pendidikan lainnya adalah Harapan Lama Sekolah (HLS). Indikator ini mengukur peluang pendidikan yang dapat diperoleh untuk anak usia sekolah (7 tahun ke atas). HLS Kota Tegal pada tahun 2022 sebesar 13,08 tahun, artinya anak usia 7 tahun ke atas akan mempunyai peluang bersekolah sampai 13 tahun atau setara DI jika kondisinya minimal sama seperti sekarang. Seperti halnya rata-rata lama sekolah, angka HLS ini semakin lama juga semakin meningkat.

3.2. Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

Selain indikator pendidikan sebelumnya, kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari keahlian/ keterampilan serta ilmu pengetahuan yang dimilikinya yang dapat digambarkan dari tingkat pendidikan yang ditamatkannya. Seseorang yang menamatkan pendidikannya hingga jenjang pendidikan yang tinggi dapat mempunyai pengetahuan yang luas serta keterampilan/keahlian yang tinggi. Dengan semakin meningkatnya keterampilan/keahlian akan semakin mudah mendapatkan kesempatan untuk bekerja. Indikator tingkat pendidikan yang ditamatkan juga dapat digunakan untuk mengetahui keberhasilan program wajib belajar 9 tahun yang dicanangkan pemerintah.

Tabel 3.1. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas menurut Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kota Tegal, 2018-2022

Jenjang Pendidikan	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tidak Pernah Sekolah/Tidak Tamat SD/MI	23,13	16,90	15,35	14,02	10,88
SD/MI	21,57	25,36	24,21	22,08	23,89
SMP/MTs	20,36	22,93	21,28	19,72	20,73
SMA/SMK/MA ke atas	34,94	34,91	39,15	44,18	44,51

Sumber: Hasil Susenas 2022

Usaha pemerintah dalam meningkatkan pendidikan di Kota Tegal patut diapresiasi. Berdasarkan hasil Susenas tahun 2022, persentase penduduk 15 tahun ke atas yang belum tamat Pendidikan setara SD/MI turun dari 14,02 persen menjadi 10,88 persen. Sebaliknya penduduk yang hanya tamat SD/MI dan SMP/MTs mengalami kenaikan dari tahun 2021 ke tahun 2022 berturut-turut sebesar 22,08 persen menjadi 23,89 persen (SD/MI) dan 19,72 persen menjadi 20,73 persen (SMP/MTs). Sementara itu juga persentase penduduk 15 tahun ke atas yang tamat SMA ke atas meningkat dari 44,18 persen pada tahun 2021 menjadi 44,51 persen pada tahun 2022. Kondisi tersebut menggambarkan adanya pergeseran jenjang pendidikan yang ditamatkan menjadi lebih tinggi,

ditandai dengan bertambahnya persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah tamat SMA ke atas

3.3. Angka Partisipasi Sekolah

Tingkat partisipasi sekolah merupakan salah satu indikator yang dapat mengukur partisipasi masyarakat dalam mengikuti pendidikan dari berbagai jenjang pendidikan dan kelompok umur. Tingkat partisipasi sekolah yang dapat diukur diantaranya yaitu Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan Angka Partisipasi Murni (APM). Pemerintah berharap agar kedua indikator selalu menunjukkan peningkatan setiap tahunnya pada setiap jenjang pendidikan. Hal ini dapat menunjukkan bahwa semakin banyak masyarakat memperoleh layanan pendidikan dasar dan menengah yang bermutu dan berkesetaraan.

Tabel 3.2. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Usia Sekolah dan Jenis Kelamin di Kota Tegal, 2020-2022 (persen)

Kelompok Umur	2020			2021			2022		
	L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7-12	99,90	100,0	99,95	99,08	100,0	99,48	97,75	98,87	99,40
13-15	94,99	97,10	96,01	97,55	98,05	97,82	97,55	100,0	95,10
16-18	80,48	76,17	78,12	81,79	74,78	78,40	63,48	87,17	75,90

Sumber: Hasil Susenas 2022

Berdasarkan data Susenas tahun 2020-2022, hampir semua kelompok umur menunjukkan peningkatan APS pada perempuan, sedangkan pada laki-laki mengalami penurunan. APS pada kelompok usia 13-15 tahun perempuan dapat dikatakan memuaskan karena nilainya mendekati 100 persen dibandingkan laki-laki. Sementara APS pada kelompok 13-15 tahun tidak mengalami perubahan tahun 2022 dibanding tahun sebelumnya pada kelompok laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa sampai umur 15 tahun (usia SMP) kesempatan belajar terbuka secara luas, selain itu nilai APS pada kelompok ini telah mencapai lebih dari 97 persen. Berbeda dengan kelompok 16-18 tahun nilai APS pada perempuan untuk jenjang 16-18 tahun meningkat di atas 85 persen. Walaupun begitu, nilai APS perempuan pada kelompok umur ini menunjukkan perbaikan dari tahun lalu.

APS laki-laki pada kelompok umur 16-18 tahun mengalami penurunan dari 81,79 persen pada tahun 2021 menjadi 63,48 persen. Namun APS perempuan pada kelompok umur yang sama menunjukkan kenaikan dari 74,78 persen pada tahun 2021 menjadi 87,17 persen pada tahun 2022.

3.4. Angka Partisipasi Murni

APM menunjukkan proporsi penduduk pada kelompok usia tertentu yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk pada kelompok usia tertentu. Secara umum, APM akan selalu lebih rendah dari APK karena APK memperhitungkan jumlah penduduk di luar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan.

Tabel 3.3. Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kota Tegal, 2020-2022 (persen)

Jenjang Pendidikan	2020			2021			2022		
	L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
SD/MI	99,90	99,32	99,61	99,08	100,0	99,48	97,75	98,97	97,75
SMP/MTs	73,81	75,60	74,68	69,64	79,06	74,81	69,86	82,62	69,86
SMA/MA	61,23	62,92	62,16	66,05	59,92	63,08	50,01	73,38	50,01

Sumber: Hasil Susenas 2022

Seperti halnya dengan APS, secara umum Angka Partisipasi Murni (APM) juga mengalami peningkatan dari tahun 2020 ke 2022, kecuali pada jenjang SD/MI yang mengalami sedikit penurunan. Pada tahun 2022 APM pada jenjang SD/MI sebesar 97,75, artinya terdapat sebesar 97,75 persen penduduk Kota Tegal yang berusia 7-12 tahun yang bersekolah tepat waktu pada jenjang Sekolah Dasar. Pada jenjang SD/MI dan SMP/MTs APM laki-laki selama 3 tahun terakhir mengalami penurunan. Pada jenjang SD/MI, APM laki-laki menurun dari 99,90 persen pada tahun 2020 menjadi 99,08 persen pada tahun 2022 dan Kembali menurun tahun 2022 sebesar 97,75. Sementara pada jenjang SMP/MTs, APM laki-laki mengalami fluktuasi dalam kurun waktu tahun 2020-2022. APM pada jenjang SMA/Ma mengalami peningkatan dari 62,16 persen pada tahun 2020 menjadi 63,08 persen pada tahun 2021 kebalikannya tahun berikutnya tahun 2022. Pada jenjang ini

APM yang mengalami fluktuasi adalah APM laki-laki, sedangkan APM perempuan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya tahun 2021. APM perempuan pada jenjang SMA/MA meningkat dari 59,92 persen pada tahun 2021 menjadi 73,38 persen.

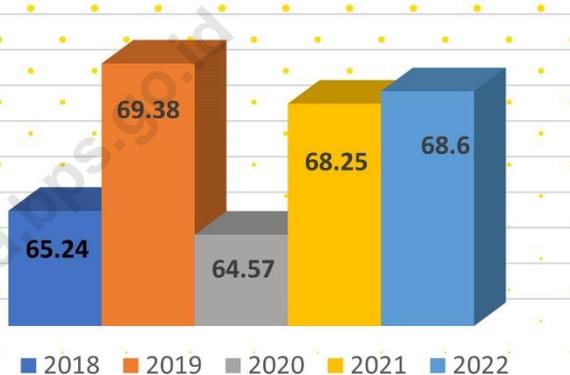
<https://tegalkota.bps.go.id>

<https://tegalkota.bps.go.id>

KETENAGA KERJAAN KOTA TEGAL 2022



TPAK Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja



TPT Tingkat Pengangguran Terbuka

<https://tegalkota.bps.go.id>



Bab 4.

KETENAGAKERJAAN

Ketenagakerjaan merupakan aspek yang mendasar dalam kehidupan bermasyarakat karena meliputi dimensi ekonomi dan sosial yang luas. Pembangunan di bidang ketenagakerjaan merupakan bagian dari upaya pengembangan sumber daya manusia yang memegang peranan penting untuk mewujudkan pembangunan manusia seutuhnya. Oleh sebab itu, pembangunan di bidang ketenagakerjaan diupayakan memberikan kontribusi yang nyata dan terukur dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Permasalahan di bidang ketenagakerjaan harus terus menjadi perhatian pemerintah agar dapat cepat diselesaikan. Permasalahan tersebut diantaranya tingginya tingkat pengangguran, masih rendahnya perluasan kesempatan kerja, pekerja anak, rendahnya produktivitas kerja, persebaran tenaga kerja yang tidak merata dan sebagainya. Kondisi tersebut merupakan tantangan yang harus diselesaikan dalam pembangunan Kota Tegal.

Dalam rangka penyusunan kebijakan, strategi dan program ketenagakerjaan untuk pemecahan masalah ketenagakerjaan sangat dibutuhkan data dan informasi ketenagakerjaan. Strategi dan program ketenagakerjaan yang tepat sangat ditentukan kondisi ketersediaan data dan informasi ketenagakerjaan.

Konsep ketenagakerjaan yang digunakan oleh BPS adalah *The Labor Force Concept* merujuk pada rekomendasi *International Labour Organization (ILO)*. Konsep ini membagi penduduk menjadi dua kelompok yaitu penduduk usia kerja dan bukan usia kerja. Selanjutnya, penduduk usia kerja dibedakan pula menjadi dua kelompok berdasarkan kegiatan utama yang dilakukan yakni angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja terdiri dari dua bagian yaitu bekerja dan pengangguran, sementara bukan angkatan kerja mencakup sekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya.

Secara alamiah pertumbuhan angkatan kerja searah dengan pertumbuhan penduduk. Namun demikian pertumbuhan penciptaan lapangan kerja yang baru berjalan lebih lambat dibandingkan pertumbuhan penduduk usia kerja. Hal ini mengakibatkan tidak semua angkatan kerja terserap oleh pasar kerja, sehingga terjadi ketidakseimbangan antara penawaran kerja dan permintaan tenaga kerja. Ketidakseimbangan ini akan menciptakan persoalan ketenagakerjaan yaitu pengangguran.

Bab ini menyajikan gambaran umum mengenai keadaan angkatan kerja di Kota Tegal. Beberapa indikator yang dianalisa mencakup Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Pengangguran Terbuka, dan penduduk bekerja. Sumber data penghitungan indikator ini diperoleh dari Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS).

4.1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator ketenagakerjaan yang penting yang digunakan untuk menganalisa dan mengukur capaian hasil pembangunan. TPAK digunakan untuk mengukur besarnya jumlah angkatan kerja, indikator ini merupakan rasio antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja (usia produktif 15 tahun keatas). Penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.

Tingkat partisipasi angkatan kerja Kota Tegal tahun 2022 sebesar 68,60 persen, ini artinya sekitar 68,60 persen penduduk usia 15 tahun keatas merupakan angkatan kerja. Kondisi ini menurun bila dibandingkan tahun 2021 yang tercatat sebesar 68,25. Analisis TPAK tanpa variabel lainnya tidak akan menarik karena TPAK tidak dapat menggambarkan baik buruknya kondisi ketenagakerjaan di suatu wilayah. TPAK yang besar belum menggambarkan kondisi ketenagakerjaan yang baik. Jika besarnya TPAK berasal dari jumlah penduduk bekerja, maka dapat

menggambarkan kondisi ketenagakerjaan yang baik karena penyerapan tenaga kerja tinggi, tetapi jika berasal dari yang menganggur justru akan menimbulkan persoalan tersendiri.

Tabel 4.1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Tegal, 2018-2022

Tahun	TPAK	TPT
(1)	(2)	(3)
2018	65,24	7,94
2019	69,38	8,07
2020	64,57	8,40
2021	68,25	8,25
2022	68,60	6,68

Sumber: Hasil Sakernas 2022

Selain TPAK, dalam analisis angkatan kerja juga dikenal indikator yang biasa digunakan untuk mengukur pengangguran yaitu TPT. Pengangguran terbuka didefinisikan sebagai orang yang sedang mencari pekerjaan atau yang sedang mempersiapkan usaha atau juga yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin lagi mendapatkan pekerjaan, termasuk juga mereka yang baru mendapat kerja tetapi belum mulai bekerja. Pengangguran terbuka tidak termasuk orang yang masih sekolah atau mengurus rumah tangga, sehingga hanya orang yang termasuk angkatan kerja saja yang merupakan pengangguran terbuka. Untuk masuk ke pasar tenaga kerja.

TPT menggambarkan ketidakseimbangan antara ketersediaan lapangan pekerjaan dan penduduk yang berusaha mendapatkan pekerjaan, dimana ketersediaan lapangan pekerjaan lebih kecil dari pencari kerja sehingga tidak mampu menampung pencari kerja. Perkembangan TPT di Kota Tegal selama tiga tahun terakhir menunjukkan peningkatan setelah sebelumnya mengalami trend penurunan. TPT Kota Tegal mengalami fluktuasi selama periode tahun 2018-2022. Angka ini secara berturut mengalami peningkatan pada tahun 2019 sebesar 8,07

persen dan tahun 2020 menjad 8,40 persen kemudian terus menurun sampai tahun 2022 menjadi 6,68 persen . Penurunan TPT pada tahun 2022 tersebut sejalan dengan penurunan penyebaran Covid-19 yang mulai menurun di Indonesia pada awal bulan januari Maret 2022. Penurunan Covid-19 berdampak pada sebagian besar lapangan usaha serta aktivitas masyarakat membuka kegiatannya. Dampaknya banyak lapangan pekerjaan kembali beraktifitas dengan membuka lapangan kerja baru menambah hasil produksinya. Dengan menurunnya anka TPT tahun 2022 sebesar 6,68 persen , pemerintah dalam menyikapi penurunan penyebaran Covid-19 tampaknya mulai membuahakan hasil untuk menurunkan angka pengangguran di awal tahun 2022.

Pendidikan yang tinggi merupakan jembatan untuk memperoleh pekerjaan yang layak dengan pendapatan besar. Hampir semua orang berkeinginan bekerja dengan penghasilan yang tinggi, untuk itu mereka berupaya dengan memperoleh pendidikan tinggi. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang akan berdampak pada semakin tinggi pula harapan dan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan tingkat pendidikannya. Namun, keterbatasan lapangan kerja yang tersedia menyebabkan mereka tidak terserap pada lapangan usaha yang sesuai dengan tingkat pendidikan dan keahliannya. Sebagian besar dari mereka yang merupakan lulusan pendidikan tinggi enggan menerima pekerjaan yang tidak sesuai dengan jenis keahlian dan jenjang pendidikan yang telah ditamatkan. Sehingga sebagian dari mereka yang tidak segera mendapatkan pekerjaan lebih memilih menunggu pekerjaan yang sesuai, atau dengan kata lain menjadi penganggur untuk sementara waktu.

4.2. Lapangan Pekerjaan

Distribusi penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha merupakan salah satu ukuran untuk melihat potensi ekonomi dalam melihat penyerapan tenaga kerja. Ukuran ini memberikan gambaran sektor mana yang dominan menyerap tenaga kerja dan sebaliknya.

Distribusi penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha pada publikasi ini dikelompokkan menjadi 5 sektor lapangan usaha yaitu pertanian (pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan), industri pengolahan, Perdagangan (Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan dan Hotel), jasa kemasyarakatan, dan

lainnya (Pertambangan dan Penggalian, Listrik, Gas dan Air, Bangunan, Angkutan, Pergudangan dan Komunikasi, Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan, Tanah dan Jasa Perusahaan).

Tabel 4.2. Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Kelompok Lapangan Usaha di Kota Tegal, 2018 – 2022

Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pertanian	7,97	2,84	7,45	7,09	7,46
Industri	14,01	14,83	15,37	14,61	26,09
Perdagangan, Jasa-jasa dan lainnya	78,02	82,33	77,18	78,31	66,45
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100

Sumber: Hasil Sakernas 2022

Catatan:

Pertanian adalah Pertanian, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan.

Industri adalah Industri Pengolahan

Perdagangan adalah Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan dan Hotel

Jasa-Jasa adalah Jasa Kemasyarakatan

Lainnya adalah Pertambangan dan Penggalian, Listrik, Gas dan Air, Bangunan, Angkutan, Pergudangan dan Komunikasi, Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan, Tanah dan Jasa Perusahaan

Perkembangan lapangan usaha pertanian selama periode tahun 2018-2022 menunjukkan persentase penduduk yang bekerja pada sektor pertanian mengalami fluktuasi, dan meningkat kembali pada tahun 2022 yang kemudian sebesar 7,46 persen seiring dengan menurunnya dampak Covid-19. Selama kurun waktu tahun 2018-2022 penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja di sektor industri cenderung mengalami peningkatan. Sektor perdagangan, jasa-jasa dan lainnya yang merupakan penyerap tenaga kerja terbesar di Kota Tegal selama lima tahun terakhir mengalami flutuasi. Tahun 2018 persentase tenaga kerja yang terserap pada sektor ini ada sebesar 78,02 persen, kemudian meningkat pada tahun 2019 menjadi 82,33 persen, namun menurun pada tahun 2020 menjadi 77,18 persen dan kemudian meningkat Kembali pada tahun 2021 menjadi 78,21 persen, pada tahun 2022 menurun kembali menjadi 66,45 persen.

4.3. Status Pekerjaan

Indikator untuk melihat gambaran tentang status/kedudukan pekerja dalam aktivitas pekerjaan yang dialami adalah distribusi tenaga kerja menurut status pekerjaan utama. Berdasarkan status pekerjaan utama selama beberapa tahun terakhir, mayoritas penduduk Kota Tegal bekerja sebagai buruh/karyawan, disusul berusaha sendiri, selanjutnya berusaha dibantu pekerja tak dibayar pada urutan ketiga.

Tabel 4.3. Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama di Kota Tegal, 2018 – 2022

Status Pekerjaan	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Berusaha Sendiri	19,75	20,55	20,96	21,35	26,04
Berusaha dibantu Pekerja tidak dibayar	9,72	9,23	14,36	11,16	5,29
Berusaha dibantu Pekerja Tetap	6,65	3,93	3,69	4,16	2,98
Buruh/Karyawan	45,92	53,74	44,12	45,80	53,46
Pekerja bebas	9,4	5,82	7,07	7,18	6,24
Pekerja tidak dibayar	8,57	6,73	9,79	10,34	5,99
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100

Sumber: Hasil Sakernas 2022

Selama tahun 2018-2022 tenaga kerja Kota Tegal sebagian besar adalah buruh/karyawan. Penduduk kota tegal Sebagian besar mempunyai status sebagai buruh/karyawan. Jika dilihat perkembangan selama tiga tahun terakhir, persentase buruh/karyawan cenderung fluktuatif. Tahun 2018 penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja sebagai buruh/karyawan tercatat sebesar 45,92 persen, kemudian mengalami fluktuasi sampai pada tahun 2022 menjadi 53,46 persen. Kondisi sebaliknya terjadi pada penduduk yang berusaha sendiri, selama 5 tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2018 penduduk berumur 15 tahun yang berusaha sendiri tercatat sebesar 19,75 persen secara terus mengalami peningkatan sampai pada tahun 2022 tercatat sebesar 26,04 persen. Sementara itu, penduduk yang berusaha dibantu dengan pekerja tetap

mengalami penurunan dari 4,16 persen pada tahun 2021 menjadi 2,89 persen pada tahun 2022. Penurunan penduduk yang berusaha dibantu pekerja tetap pada tahun 2021, sejalan dengan meningkatnya persentase berusaha sendiri. Begitu pula penduduk yang berstatus pekerja bebas juga mengalami penurunan dari 7,18 persen pada tahun 2021 menjadi 6,24 persen pada tahun 2022.

Peningkatan persentase penduduk yang bekerja sebagai buruh/karyawan pada tahun 2022 sejalan dengan menurunnya penyebaran Covid-19 yang berdampak pada sebagian besar penduduk untuk beraktifitas kembali untuk bekerja. Hal ini kemudian memaksa penduduk yang sebelumnya bekerja sebagai buruh/karyawan menciptakan peluang usaha baru ditandai dengan meningkatnya persentase penduduk yang berusaha sendiri namun ada juga yang bekerja sebagai pekerja bebas. Dari table di atas terlihat secara umum persentase penduduk yang bekerja sendiri dan buruh/karyawan berdampak positif dalam menciptakan lapangan kerja. Kondisi tahun 2022 sedikit demi sedikit mulai adanya pemulihan dan perbaikan pada sektor ketenagakerjaan sejalan dengan penurunan pandemi Covid-19.

Penduduk yang berstatus pekerja tidak dibayar pada tahun 2022 mengalami penurunan dari 10,34 persen (pekerja bebas) pada tahun 2021 menjadi 5,99 persen tahun 2022. Penurunan penduduk yang bekerja tidak dibayar sebagai akibat dari mulai terbukanya lapangan usaha. Hal ini menjadi sinyal positif bagi kondisi ketenagakerjaan di Kota Tegal. Penduduk pada kelompok tersebut menjadi sedikit demi sedikit akan mengurangi beban bagi keluarganya atau orang lain karena telah mampu menciptakan nilai tambah ekonominya sendiri.

<https://tegalkota.bps.go.id>

TARAF DAN POLA KONSUMSI KOTA TEGAL 2022



PENGELUARAN
PERKAPITA PER BULAN
Rp 1.341.316

MAKANAN
50,07 %



NO MAKANAN
49,93 %



<https://tegalkota.bps.go.id>



Bab 5.

TARAF DAN POLA KONSUMSI

Pola konsumsi rumah tangga merupakan salah satu indikator kesejahteraan rumah tangga/keluarga. Selama ini berkembang pengertian bahwa besar kecilnya proporsi pengeluaran untuk konsumsi makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga dapat memberikan gambaran kesejahteraan rumah tangga tersebut. Rumah tangga dengan proporsi pengeluaran yang lebih besar untuk konsumsi makanan mengindikasikan rumah tangga tersebut berpenghasilan rendah. Makin tinggi penghasilan rumah tangga, maka makin kecil proporsi pengeluaran untuk makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga. Dengan kata lain rumah tangga dikatakan sejahtera bila persentase pengeluaran untuk makanan jauh lebih kecil dibandingkan persentase pengeluaran untuk non makanan.

5.1. Pengeluaran Rumah Tangga

Pengeluaran rumah tangga dibedakan menurut kelompok makanan dan bukan makanan. Perubahan pendapatan seseorang akan berpengaruh pada pergeseran pola pengeluaran. Semakin tinggi pendapatan, cenderung akan semakin tinggi pengeluaran untuk bukan makanan. Pergeseran pola pengeluaran terjadi karena elastisitas permintaan terhadap makanan pada umumnya rendah, sebaliknya elastisitas permintaan terhadap barang bukan makanan pada umumnya tinggi. Keadaan ini jelas terlihat pada kelompok penduduk yang tingkat konsumsi makanannya sudah mencapai titik jenuh, sehingga peningkatan pendapatan akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan bukan makanan atau ditabung. Dengan demikian, pola pengeluaran dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, dimana perubahan komposisinya digunakan sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan.

Pada gambar 5.1 terlihat pengeluaran rata-rata per kapita sebulan tahun 2018 hingga tahun 2022, pengeluaran per kapita sebulan penduduk Kota Tegal mengalami penurunan dari Rp 1.271.372 pada tahun 2018 menjadi Rp 1.271.313

rupiah pada tahun 2019, kemudian 3 tahun berturut-turut sampai pada tahun 2021 mengalami peningkatan dan menurun kembali sebesar 1.341.316 pada tahun 2022.

Gambar 5.1. Rata-rata Pengeluaran per Kapita sebulan di Kota Tegal, 2018-2022 (Rupiah)



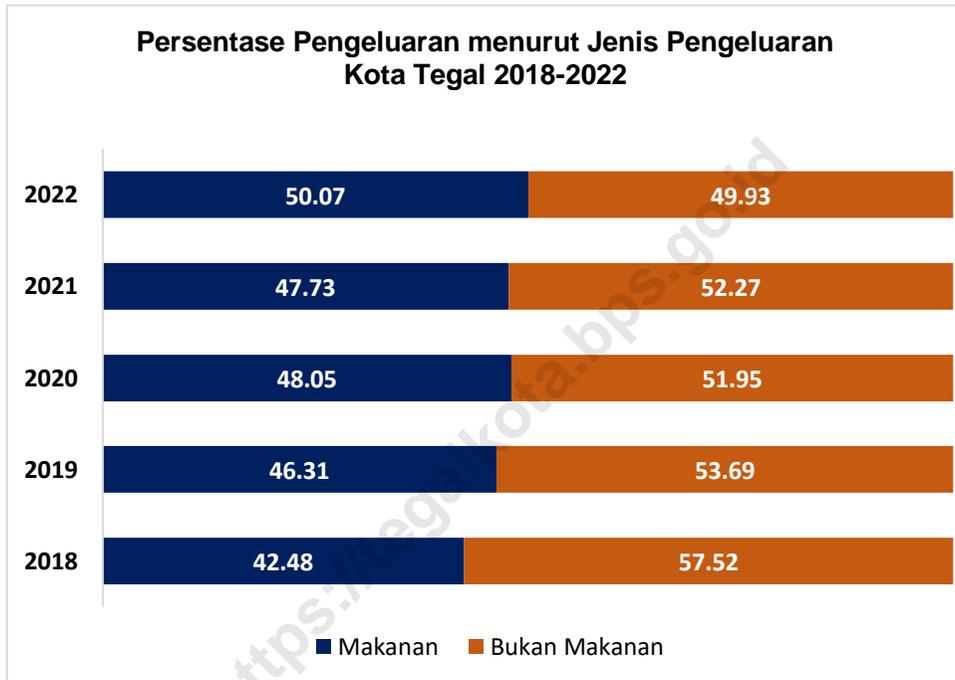
Sumber: Hasil Susenas 2022

Dalam lima tahun terakhir terlihat bahwa proporsi pengeluaran untuk konsumsi bukan makanan lebih tinggi dibandingkan pengeluaran untuk makanan. Proporsi untuk pengeluaran bukan makanan lebih dari 50 persen dengan fluktuasi yang mendekati 60 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kebutuhan masyarakat telah bergeser dimana kebutuhan bukan makanan lebih besar daripada kebutuhan makanan. Tahun 2018 merupakan nilai terkecil untuk persentase pengeluaran makanan selama periode lima tahun terakhir.

Bila dilihat persentase pengeluaran untuk makanan selama lima tahun mengalami berfluktuasi. Persentase terbesar pengeluaran makanan terjadi pada tahun 2022, yang mencapai 50,07 persen. Tahun 2022, pengeluaran makanan terbesar didominasi oleh pengeluaran kelompok komoditas makanan dan

minuman jadi yang mencapai lebih dari separoh (46,23 persen) dari total pengeluaran makanan. Sementara pengeluaran non makanan pada tahun 2022 didominasi oleh kelompok pengeluaran perumahan dan fasilitas rumah tangga.

Gambar 5.2 Persentase Pengeluaran menurut Jenis Pengeluaran di Kota Tegal, 2018-2022 (Persen)



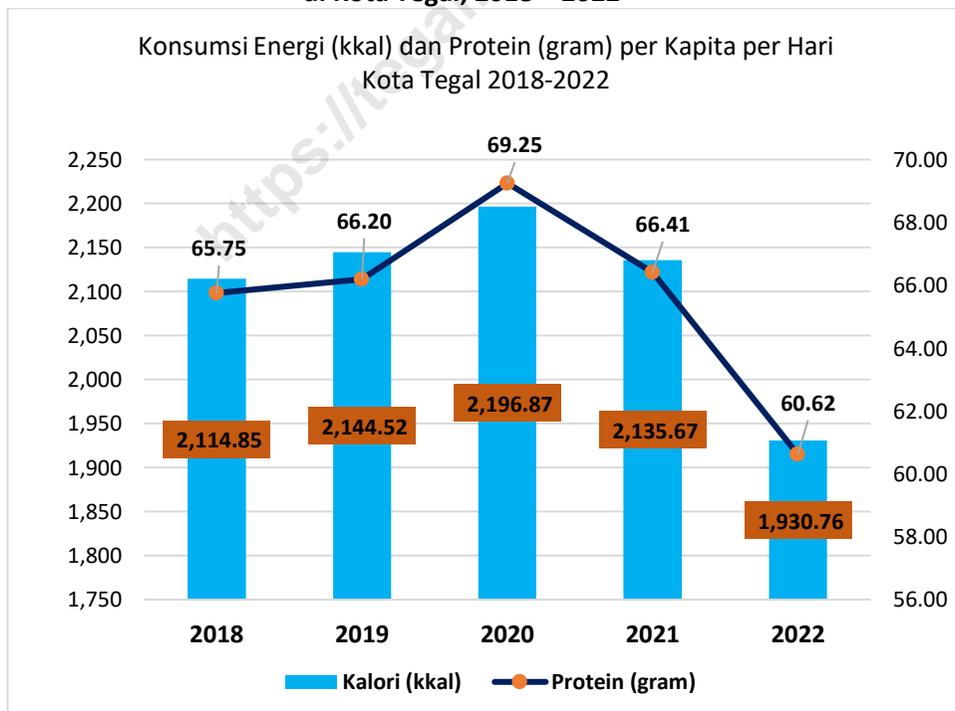
Sumber: Hasil Susenas 2022

Jika dilihat dari komposisi jenis pengeluaran, maka kelompok pengeluaran makanan mempunyai proporsi lebih tinggi dengan selisih sebesar 0,14 poin dengan kelompok bukan makanan, sementara untuk proporsi pengeluaran makanan mengalami peningkatan dari 47,73 persen menjadi 50,07 persen pada tahun 2022. Peningkatan pengeluaran makanan tahun 2022 akibat dilonggarkannya aktifitas masyarakat sejalan dengan penurunan penyebaran Covid-19 di Kota Tegal, pola peningkatan pengeluaran masyarakat diduga berkaitan erat dengan hal tersebut. Walaupun secara proporsi mengalami peningkatan, pengeluaran rata-rata per kapita untuk golongan makanan maupun bukan makanan tidak begitu besar selisihnya.

5.2. Konsumsi Energi dan Protein

Tingkat kecukupan gizi yang mencakup konsumsi kalori dan protein merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk. Jumlah konsumsi kalori dan protein dihitung berdasarkan jumlah dari hasil kali antara kuantitas setiap makanan yang dikonsumsi dengan besarnya kandungan kalori dan protein dalam setiap makanan tersebut. Angka Kecukupan Gizi (AKG) yang dianjurkan adalah suatu kecukupan rata-rata zat gizi setiap hari bagi semua orang menurut golongan umur, jenis kelamin, ukuran tubuh, aktivitas tubuh untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 75 Tahun 2013 (Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi XI tahun 2012), rata-rata kecukupan energi dan protein bagi penduduk Indonesia masing-masing sebesar 2150 kkal dan 57 gram protein.

Gambar 5.1. Konsumsi Energi (kkal) dan Protein (gram) per Kapita per Hari di Kota Tegal, 2018 – 2022



Sumber: Hasil Susenas 2022

Pada tahun 2022 rata-rata konsumsi kalori penduduk Kota Tegal sebesar 1.930,76 kkal, menurun bila dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 2.135,67 kkal. Hal ini menunjukkan bahwa secara rata-rata konsumsi kalori per hari penduduk pada tahun 2022 masih belum memenuhi syarat kecukupan gizi yang ditentukan, yakni sebesar 2.150 kkal. Sementara itu, rata-rata konsumsi protein per kapita penduduk Kota Tegal juga mengalami peningkatan selama tahun 2018-2020, namun terus mengalami penurunan pada tahun 2021-2022 berturut-turut 60,41 dan 60,62. Berdasarkan standar kecukupan gizi yang disyaratkan oleh Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi yaitu sebesar 57 gram protein, itu artinya bahwa konsumsi protein penduduk Kota Tegal telah memenuhi standar kecukupan protein.

<https://tegalkota.bps.go.id>

<https://tegalkota.bps.go.id>

PERUMAHAN KOTA TEGAL 2022



LANTAI BUKAN
TANAH **98,58 %**



RUMAH MILIK
SENDIRI **67,22 %**



AIR MINUM KEMASAN/
LEDENG **99,48 %**

<https://tegalkota.bps.go.id>



Bab 6.

PERUMAHAN

Rumah dan kelengkapannya merupakan kebutuhan dasar dan juga merupakan faktor penentu indikator kesejahteraan rakyat. Rumah mempunyai pengaruh terhadap pembinaan watak dan kepribadian serta merupakan faktor penting terhadap produktivitas kerja dan kreativitas kerja seseorang. Selain itu rumah juga mempunyai fungsi strategis sebagai pusat pendidikan keluarga, persemaian budaya, dan peningkatan kualitas generasi yang akan datang. Dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat melalui pemenuhan kebutuhan papan maka akan terwujud kesejahteraan rakyat.

Rumah juga merupakan sarana pengamanan dan pemberi ketentraman hidup bagi manusia. Dalam fungsinya sebagai pengamanan diri bukan berarti menutup diri tetapi harus membuka diri menyatu dengan lingkungannya. Kualitas lingkungan rumah tinggal mempengaruhi terhadap status kesehatan penghuninya. Kualitas rumah tinggal yang baik dalam lingkungan sehat, aman, lestari dan berkelanjutan (Kepmen no.9 tahun 1999) diartikan sebagai suatu kondisi rumah yang memenuhi standard minimal dari segi kesehatan, sosial, budaya, ekonomi, dan kualitas teknis.

Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Pemukiman sebagai pengganti dari Undang-Undang No. 4 tahun 1992 mencantumkan bahwa salah satu tujuan diselenggarakannya perumahan dan kawasan permukiman yaitu untuk menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Definisi perumahan itu sendiri merupakan kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan fasilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. Rumah selain sebagai tempat tinggal, juga dapat menunjukkan status sosial seseorang. Status sosial seseorang berhubungan positif dengan kualitas/kondisi rumah. Semakin tinggi status sosial seseorang

semakin besar peluang untuk memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal dengan kualitas yang lebih baik.

Salah satu dari sekian banyak fasilitas yang dapat mencerminkan kesejahteraan rumah tangga adalah kualitas material seperti jenis atap, dinding dan lantai terluas yang digunakan, termasuk juga fasilitas penunjang lain yang meliputi sumber air minum, fasilitas tempat buang air besar, dan sumber penerangan. Kualitas perumahan yang baik dan penggunaan fasilitas perumahan yang memadai akan memberikan kenyamanan bagi penghuninya.

6.1. Kualitas Rumah Tinggal

Rumah tinggal yang dapat dikategorikan ke dalam rumah yang layak huni sebagai tempat tinggal harus memenuhi beberapa kriteria kualitas rumah tempat tinggal. Beberapa diantaranya yaitu rumah yang memiliki dinding terluas yang terbuat dari tembok atau kayu, dengan beratapkan beton, genteng, sirap, seng maupun asbes, dan memiliki lantai terluas bukan tanah. Luas lantai rumah seringkali dianggap sebagai gambaran untuk menilai kemampuan social ekonomi masyarakat. Selain itu, luas lantai juga menentukan tingkat kesehatan penghuninya. Luas lantai yang sempit dapat mengurangi konsumsi oksigen penghuni rumah serta mempercepat proses penularan penyakit. Selama ini alat ukur yang dipakai adalah luas lantai perkapita, yaitu rata-rata luas lantai untuk setiap anggota rumah tangga atau dengan bahasa matematisnya adalah keseluruhan luas lantai dibagi total penduduk.

Menurut Kementerian Kesehatan, ukuran luas lantai yang ideal digunakan per orang minimal adalah 8 meter persegi, sedangkan menurut *World Health Organization (WHO)* serta *American Public Health Organization (APHA)* yang telah disesuaikan dengan kondisi di Indonesia, ukuran luas lantai yang ideal digunakan per orang minimal adalah 10 meter persegi (BPS, 2019).

Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), selama tahun 2018-2022 persentase rumah tangga yang bertempat tinggal di rumah yang berlantai bukan tanah menunjukkan jumlah yang fluktuatif dengan nilai lebih dari 96 persen. Secara berturut-turut rumah yang berlantai bukan tanah dari tahun 2018-2022 sebesar 98,13 persen, menurun pada tahun 2020 menjadi 97,52

persen, pada tahun 2021-2022 mengalami kenaikan 98,58.

Tabel 6.1 Persentase Rumah Tangga Menurut Beberapa Indikator Kualitas Perumahan di Kota Tegal, 2018 – 2022

Kualitas Perumahan	2018	2019	2020	2021	2022 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Lantai Bukan Tanah	98,13	96,90	97,52	98,58	98,58
Atap Benton, genteng, sirap, seng, dan abses	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Dinding terluas tembok dan kayu	99,72	99,74	99,69	99,67	99,67
Luas Lantai per kapita $\geq 10 \text{ m}^2$	88,95	82,33	88,48	90,82	90,82

*) Sumber: Hasil Susenas 2021

Indikator lain yang digunakan untuk melihat kualitas perumahan untuk rumah tinggal adalah penggunaan atap dan dinding terluas. Selama periode tahun 2018-2022 terlihat bahwa semua rumah tangga memiliki atap beton, genteng, sirap, seng, dan asbes dengan capaian angka 100 persen. Kualitas rumah dari sisi dinding selama tahun 2018-2021 menunjukkan bahwa rumah dengan dinding terluas tembok dan kayu mempunyai kecenderungan yang meningkat, namun pada tahun 2021 dan 2022 mengalami penurunan kembali.

Indikator kesejahteraan penduduk yang lainnya adalah luas lantai tempat tinggal. Luas lantai rumah seringkali dianggap sebagai gambaran untuk menilai kemampuan sosial ekonomi masyarakat. Selain itu, luas lantai juga menentukan tingkat kesehatan penghuninya. Luas lantai yang sempit dapat mengurangi konsumsi oksigen penghuni rumah serta mempercepat proses penularan penyakit. Selama ini alat ukur yang dipakai adalah luas lantai perkapita, yaitu rata-rata luas lantai untuk setiap anggota rumah tangga atau dengan bahasa matematisnya adalah keseluruhan luas lantai dibagi total penduduk.

Menurut Kementerian Kesehatan, ukuran luas lantai yang ideal digunakan per orang minimal adalah 8 meter persegi, sedangkan menurut *World Health Organization (WHO)* serta *American Public Health Organization (APHA)* yang telah disesuaikan dengan kondisi di Indonesia, ukuran luas lantai yang ideal digunakan per orang minimal adalah 10 meter persegi (BPS, 2019). Berdasarkan klasifikasi

yang ditentukan oleh menteri kesehatan, idealnya suatu wilayah adalah jika lebih dari 95 persen rumah tangga memiliki rumah dengan luas lantai perkapita lebih dari 8 m². Persentase rumah tangga di Kota Tegal dengan luas lantai perkapita yang memenuhi standar kementerian kesehatan pada tahun 2021 dan 2022 meningkat, dari 88,48 persen pada tahun 2020 menjadi 90,82 persen pada tahun 2021-2022.

6.2. Fasilitas Rumah Tinggal

Kualitas dan kenyamanan rumah tinggal ditentukan oleh kelengkapan fasilitas suatu rumah tinggal. Yang termasuk dalam kelengkapan fasilitas tersebut adalah tersedianya air bersih, sanitasi yang layak, serta penerangan yang baik. Air bersih merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari. Ketersediaan dalam jumlah yang cukup terutama untuk keperluan minum dan masak merupakan tujuan dari program penyediaan air bersih yang terus menerus diupayakan pemerintah.

Tabel 6.2 Persentase Rumah Tangga Menurut Beberapa Fasilitas Perumahan di Kota Tegal, 2018 – 2022

Fasilitas Perumahan	2018	2019	2020	2021	2022 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Air Minum Kemasan/Ledeng	97,62	99,23	99,83	99,48	99,48
Penerangan Listrik	100,00	100,00	99,87	100,00	100,00
Jamban Sendiri	65,57	71,59	68,20	80,68	80,68

*) Sumber: Hasil Susenas 2021

Besarnya persentase rumah tangga yang menggunakan air minum layak dan bersih selama tahun 2018-2020 mempunyai kecenderungan meningkat, sementara itu pada tahun 2021-2022 kondisinya menurun menjadi yaitu 99,48 persen. Persentase rumah tangga yang mengkonsumsi air kemasan, air isi ulang dan ledeng di Kota Tegal secara umum sudah lebih tinggi dibandingkan Provinsi Jawa Tengah. Hal ini merupakan kondisi yang wajar karena Kota Tegal adalah wilayah perkotaan sedangkan wilayah Provinsi Jawa Tengah sebagian besar merupakan wilayah pedesaan. Sebagian kecil masyarakat Kota Tegal masih memanfaatkan sumur dengan bantuan pompa air untuk pengambilan airnya.

Fasilitas perumahan yang penting lainnya adalah penerangan. Sumber penerangan yang ideal adalah yang berasal dari listrik (PLN dan Non-PLN), karena cahaya listrik lebih terang dibandingkan sumber penerangan lainnya. Berdasarkan hasil Susenas, tahun 2021-2022 semua rumah tangga di Kota Tegal telah menikmati fasilitas penerangan listrik.

Penyediaan sarana jamban merupakan bagian dari usaha sanitasi yang cukup penting peranannya. Jika ditinjau dari sudut kesehatan lingkungan, pembuangan kotoran manusia yang tidak saniter akan mencemari lingkungan terutama tanah dan sumber air. Selain itu juga akan menyebabkan berbagai macam penyakit seperti tipes, disentri, kolera, dan sebagainya. Untuk mencegah dan mengurangi kontaminasi terhadap lingkungan maka pembuangan kotoran manusia harus dikelola dengan baik sesuai dengan ketentuan jamban yang sehat. Fasilitas rumah tinggal yang berkaitan dengan hal tersebut adalah ketersediaan jamban sendiri dengan tangki septik. Rumah Tangga yang telah memiliki jamban sendiri mengalami peningkatan dari 68,20 persen pada tahun 2020 menjadi 80,68 persen pada tahun 2021-2022.

6.3. Status Kepemilikan Rumah Tinggal

Salah satu indikator yang digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan dan juga peningkatan taraf hidup masyarakat adalah status kepemilikan rumah tinggal. Kondisi ekonomi rumah tangga sangat berpengaruh terhadap kepemilikan rumah tinggal. Status kepemilikan rumah tinggal yang dicakup di sini adalah rumah milik sendiri, kontrak, sewa, bebas sewa, rumah dinas, rumah milik orang tua/saudara atau status kepemilikan lainnya. Rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri dapat dikatakan telah mampu memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal yang terjamin dan permanen dalam jangka panjang.

Gambar 6.1. Persentase Rumah Tangga menurut Status Kepemilikan Rumah Tinggal di Kota Tegal, 2018–2022



Sumber: Hasil Susenas 2022

Berdasarkan hasil Susenas 2022, selama tahun 2018-2020 kepemilikan rumah milik sendiri mempunyai kecenderungan meningkat, sementara itu pada tahun 2021 mengalami penurunan, dari sebesar 66,55 persen tahun 2020 menurun menjadi 65,84 persen pada tahun 2021, dan meningkat Kembali menjadi 67,22 pada tahun 2022.

KEMISKINAN KOTA TEGAL 2022

JUMLAH PENDUDUK
MISKIN

19,78 RIBU JIWA

PERSENTASE
PENDUDUK MISKIN

7,91 RIBU JIWA

GARIS
KEMISKINAN

Rp.565.826,--



Indeks kedalaman
kemiskinan

1,51

Indeks keparahan
kemiskinan

0,28

<https://tegalkota.bps.go.id>



Bab 7.

KEMISKINAN

Pembangunan pada dasarnya bertujuan menciptakan kemakmuran dan mengurangi kemiskinan. Kemiskinan merupakan ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan makanan dan bukan makanan yang diukur dari pengeluaran (BPS). Kemiskinan merupakan masalah multidimensi, yang bukan hanya mencakup kondisi ekonomi tetapi juga sosial, budaya, dan politik. Kemiskinan menjadi masalah utama yang terjadi di setiap daerah, termasuk Kota Tegal.

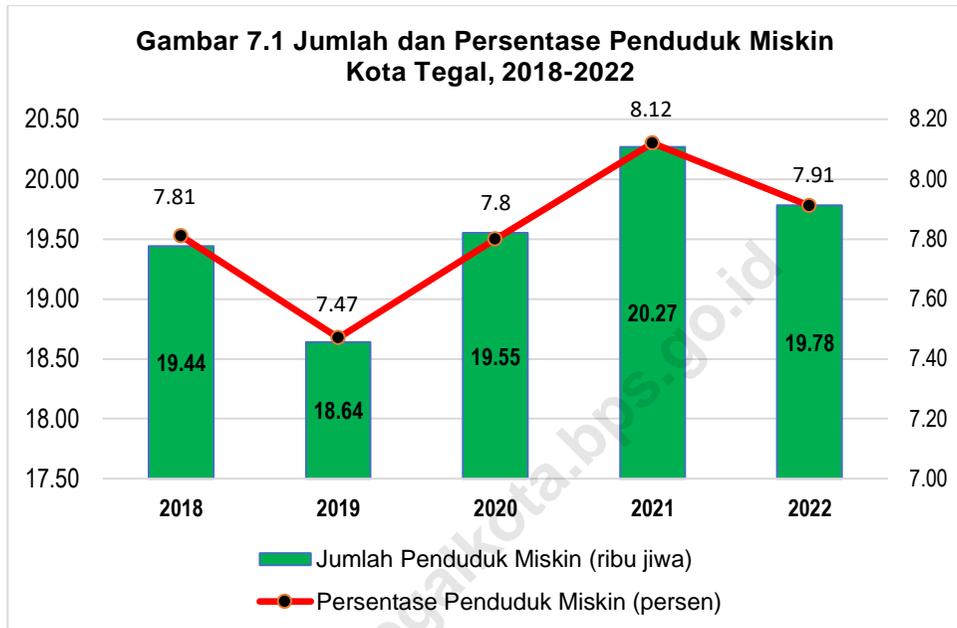
Pentingnya pemberantasan kemiskinan ditunjukkan salah satunya dengan tujuan MDGs, yang kemudian berubah menjadi SDGs mulai tahun 2016. Kemiskinan menjadi permasalahan krusial karena mempengaruhi aspek-aspek kehidupan seperti kesehatan, pendidikan, makanan, dan perumahan. Berkurangnya jumlah penduduk miskin mencerminkan bahwa secara keseluruhan pendapatan penduduk meningkat, sedangkan meningkatnya jumlah penduduk miskin mengindikasikan menurunnya pendapatan penduduk. Dengan demikian jumlah penduduk miskin merupakan indikator yang cukup baik untuk mengukur tingkat kesejahteraan rakyat.

Aspek lain yang perlu dipantau berkenaan dengan peningkatan pendapatan penduduk tersebut adalah seberapa jauh gap atau perbedaan antara penduduk miskin dengan garis kemiskinan (P1) dan seberapa besar variasi pendapatan antar penduduk miskin (P2). Tentunya, semakin kecil indikator-indikator tersebut menandakan bahwa program pengentasan kemiskinan di suatu wilayah berhasil. Indikator distribusi pendapatan, walaupun didekati dengan pengeluaran, akan memberi petunjuk aspek pemerataan yang telah tercapai.

7.1. Perkembangan Kemiskinan

Masalah kemiskinan saat ini mendesak pemerintah untuk segera melakukan langkah-langkah nyata dalam penanggulangannya, sehingga penanggulangan kemiskinan menjadi salah satu prioritas yang utama dalam pelaksanaan

pembangunan nasional. Penanggulangan kemiskinan diarahkan untuk mengurangi penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan dan mencegah terjadinya kemiskinan baru.



Sumber: Hasil Susenas 2022

Selama periode 2019-2021, penduduk miskin di Kota Tegal menunjukkan tren naik baik dari sisi jumlah maupun persentase. Angkanya menurun Kembali tahun. Pada tahun 2019 persentase penduduk miskin telah mencapai 7,47 persen, angka tersebut kemudian naik 0,33 poin di tahun 2020 menjadi 7,80 persen dan kembali meningkat sebesar 0,32 poin pada tahun 2021 menjadi 8,12 persen dan menurun 0,21 poin Kembali tahun 2022. Meningkatnya jumlah penduduk miskin pada tahun 2019 hingga 2021 sejalan dengan meningkatnya penyebaran COVID-19. Masyarakat miskin, rentan miskin dan yang bekerja di sektor informal merupakan yang paling terdampak dari mewabahnya pandemi COVID-19. Selama Pandemi Covid-19 penduduk mengalami penurunan pendapatan. Penurunan tersebut menyebabkan kemiskinan semakin bertambah karena semakin banyak penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Kondisi tersebut tentu saja menjadi tantangan besar bagi pemerintah Kota Tegal. RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2018-2023 menargetkan angka kemiskinan sebesar 5,59-6,57 persen, maka

pemerintah harus bekerja ekstra keras untuk mewujudkan target kemiskinan mengingat angka kemiskinan tahun 2022 masih jauh di atas target RPJMD.

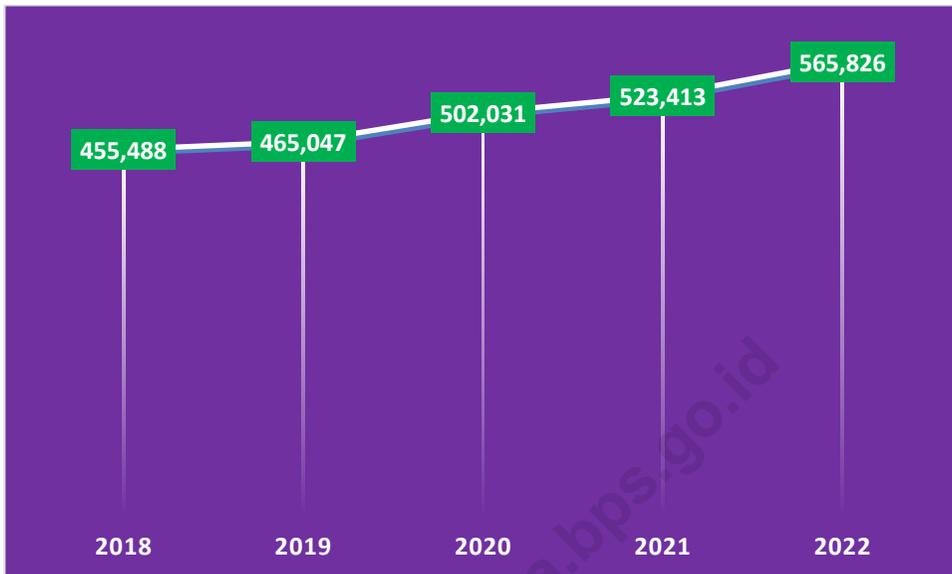
Berbagai upaya pengentasan kemiskinan di Kota Tegal tentu tidak lepas dari upaya-upaya Tim penanggulangan Kemiskinan Pemerintah Kota Tegal. Upaya-upaya tersebut merupakan sinergi dari berbagai kegiatan. Upaya di bidang pendidikan adalah dengan adanya pendidikan gratis tingkat SD dan SMP. Upaya di bidang sosial yaitu adanya program pemberian bantuan sosial antara lain pemberian bantuan uang untuk lansia terlantar, pemberian uang untuk penunggu pasien miskin, dan pembaharuan data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Upaya di bidang kesehatan yaitu dilakukan dengan program pembayaran BPJS Kesehatan menggunakan APBD untuk masyarakat miskin yang terdapat dalam Basis Data Terpadu. Upaya-upaya lain yang dilakukan yaitu rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni, dan sambungan air bersih untuk masyarakat miskin.

7.2. Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan, dan Indeks Keparahan Kemiskinan

Garis Kemiskinan digunakan sebagai batas untuk mengelompokkan penduduk miskin dan tidak miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per bulan di bawah garis kemiskinan (GK). Kenaikan garis kemiskinan menunjukkan bahwa daya beli masyarakat semakin tinggi yang secara tidak langsung menyiratkan meningkatnya kemakmuran masyarakat.

Berdasarkan grafik garis kemiskinan Kota Tegal, garis kemiskinan setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan. Garis kemiskinan tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 berturut-turut mengalami kenaikan sebesar Rp 455.488, Rp 465.043, Rp 502.031, Rp 523.413, dan Rp 565.826. Peningkatan garis kemiskinan ini sejalan dengan peningkatan untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

Gambar 7.2. Garis Kemiskinan Kota Tegal, 2018-2022 (Rp/Kapita/Bulan)



Sumber: Hasil Susenas 2022

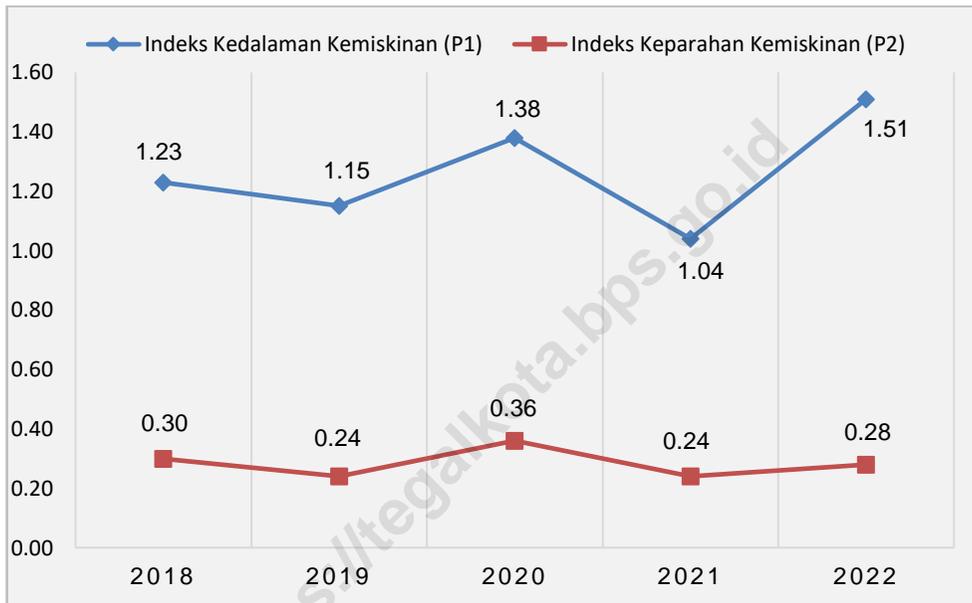
Meningkatnya garis kemiskinan dipengaruhi oleh meningkatnya gaya hidup penduduk serta meningkatnya harga kebutuhan pokok dari tahun ke tahun. Pandemi COVID-19 membuat peningkatan garis kemiskinan tahun 2021 lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya kebutuhan untuk menjaga kesehatan seperti mahalnya harga masker dan cairan antiseptik terutama di awal pandemi.

Persoalan kemiskinan tidak hanya mengurangi jumlah dan persentase penduduk miskin, namun juga perlu memperhatikan jarak terhadap batas miskin (tingkat kedalaman kemiskinan) dan ketimpangan antar penduduk miskin (tingkat keparahan kemiskinan). Oleh karena itu, selain harus mampu mengurangi jumlah dan persentase penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan tingkat keparahan kemiskinan.

Indeks kedalaman kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Perkembangan indeks kedalaman kemiskinan di Kota Tegal selama periode tahun 2018 sampai tahun 2022 mengalami fluktuatif.

Tingkat kedalaman tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar 1,51 persen sementara tahun 2021 merupakan tahun dimana kondisi tingkat kedalaman kemiskinan terendah yaitu 1,04.

Gambar 7.3. Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Kota Tegal, 2018-2022



Sumber: Hasil Susenas 2022

Indeks keparahan kemiskinan (P2) memberi gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Pada tahun 2022, indeks keparahan kemiskinan di Kota Tegal sebesar 0,28 meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 0,40 poin. Meningkatnya indeks tersebut mengindikasikan bahwa ketimpangan rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin sedikit melebar.

<https://tegalkota.bps.go.id>



KESIMPULAN



Kota Tegal merupakan Kota dengan jumlah penduduk terkecil ketiga di Provinsi Jawa Tengah setelah Kota Magelang dan Kota Salatiga. Namun demikian Kota Tegal merupakan wilayah yang padat, hal ini bisa dilihat dari kepadatan wilayahnya yang menempati posisi keempat di Jawa Tengah setelah Kota Surakarta, Kota Magelang, dan Kota Pekalongan.

Dalam tiga tahun terakhir, angka ketergantungan penduduk mengalami penurunan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, kemudian merangkak naik kembali sampai tahun 2022. Komposisi penduduk produktif usia (15-64 tahun) lebih tinggi dibandingkan jumlah penduduk non produktif usia (0-14 tahun dan 65+). Kondisi tersebut disebut dengan bonus demografi dimana jumlah penduduk produktif semakin banyak dan jumlah penduduk non produktif semakin berkurang. Bonus demografi tersebut akan menjadi keuntungan bagi suatu daerah jika penduduk produktif yang ada adalah penduduk yang berkualitas.

Salah satu indikator untuk mengukur kualitas sumber daya manusia adalah tingkat pendidikan. Selama lima tahun terakhir, kualitas pendidikan di Kota Tegal yang diukur berdasarkan indikator seperti Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), Harapan Lama Sekolah (HLS), Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Murni (APM) secara umum mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk yang produktif.

Sejak beberapa tahun terakhir, terjadi pergeseran secara perlahan namun pasti persentase lapangan usaha utama dari pertanian menjadi perdagangan dan industri. Pergeseran ini didorong oleh semakin sempitnya lahan pertanian di Kota Tegal dan juga ketertarikan penduduk pada lapangan usaha ini mulai menurun yang

mengakibatkan menurunnya produktifitas hasil pertanian. Menurunnya ketertarikan pada lapangan usaha pertanian disebabkan oleh banyak hal antara lain tingkat pendidikan yang semakin tinggi yang mendorong angkatan kerja untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dengan upah/keuntungan lebih tinggi yang saat ini banyak ditawarkan oleh lapangan usaha yang lain.

Rumah tangga dikatakan sejahtera jika persentase pengeluaran untuk makanan lebih besar dibandingkan untuk bukan makanan. Pada tahun 2022, pola pengeluaran masyarakat Kota Tegal didominasi oleh pengeluaran makanan. Jika dilihat dari kecukupan gizinya, ternyata masyarakat Kota Tegal baru tercukupi asupan proteinnya, sedangkan untuk konsumsi kalornya masih belum mencukupi standar kecukupan kalori yang disyaratkan oleh Widya Karya Nasional Pangan & Gizi.

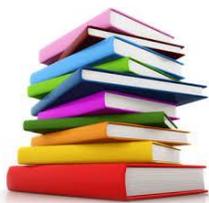
Membbaiknya pendapatan penduduk berdampak pula pada membaiknya kualitas perumahan yang dapat dilihat dari meningkatnya persentase penggunaan atap beton/genteng/seng/asbes, penggunaan air bersih, luas lantai per kapita $\geq 10 \text{ m}^2$. Selain berdasarkan kualitas perumahan, kepemilikan rumah milik sendiri pun semakin meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini didukung dengan upaya pemerintah membangun rumah sederhana ditambah dengan dukungan perbankan yang semakin menekan bunga KPR. Akan tetapi kondisi tersebut belum dapat menjadi solusi atas pertumbuhan penduduk yang masih jauh melampaui pertumbuhan perumahan. Akibatnya persentase rumah tangga dengan luas lantai perkapita dibawah standar baik dari Kementrian Kesehatan maupun Undang-Undang masih banyak ditemukan keberadaannya di Kota Tegal.

Membbaiknya kualitas pendidikan dan perumahan dapat menjadi indikator meningkatnya kesejahteraan penduduk yang berimbas pada penurunan tingkat kemiskinan. Akan tetapi, pengecualian terjadi pada tahun 2020 sampai triwulan pertama 2022 akibat adanya pandemi Covid-19, tingkat kemiskinan meningkat di Kota Tegal. Sementara itu, peningkatan kemiskinan di Kota Tegal sejalan dengan meningkatnya indeks kedalaman serta keparahan kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan pada tahun 2022 sedikit meningkat.

Indeks kedalaman kemiskinan menggambarkan bahwa masih terdapat penduduk miskin dengan pengeluaran yang jauh di bawah garis kemiskinan. Sementara itu, indeks keparahan kemiskinan menggambarkan masih ada ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin itu sendiri.

<https://tegalkota.bps.go.id>

<https://tegalkota.bps.go.id>



DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah 2010-2023. Jakarta.
- BPS Kota Tegal, 2021. Kota Tegal Dalam Angka 2022. Tegal.
- BPS Provinsi Jawa Tengah, 2018. Keadaan Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Tengah 2017. Semarang.
- BPS Provinsi Jawa Tengah, 2019. Keadaan Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Tengah 2018. Semarang.
- BPS Provinsi Jawa Tengah, 2020. Keadaan Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Tengah 2019. Semarang.
- BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021. Keadaan Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Tengah 2020. Semarang.
- BPS Provinsi Jawa Tengah, 2018. Pengeluaran untuk Konsumsi Penduduk Jawa Tengah, 2017. Semarang.
- BPS Provinsi Jawa Tengah, 2019. Pengeluaran untuk Konsumsi Penduduk Jawa Tengah, 2018. Semarang.
- BPS Provinsi Jawa Tengah, 2020. Pengeluaran untuk Konsumsi Penduduk Jawa Tengah, 2019. Semarang.
- BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021. Pengeluaran untuk Konsumsi Penduduk Jawa Tengah, 2020. Semarang.
- BPS Provinsi Jawa Tengah, 2022. Pengeluaran untuk Konsumsi Penduduk Jawa Tengah, 2021. Semarang.
- BPS Provinsi Jawa Tengah, 2018. Profil Kesehatan Provinsi Jawa Tengah 2017. Semarang.
- BPS Provinsi Jawa Tengah, 2019. Profil Kesehatan Provinsi Jawa Tengah 2018. Semarang.
- BPS Provinsi Jawa Tengah, 2020. Profil Kesehatan Provinsi Jawa Tengah 2019. Semarang.

- BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021. Profil Kesehatan Provinsi Jawa Tengah 2020. Semarang.
- BPS Provinsi Jawa Tengah, 2018. Profil Tempat Tinggal Provinsi Jawa Tengah 2017. Semarang.
- BPS Provinsi Jawa Tengah, 2019. Profil Tempat Tinggal Provinsi Jawa Tengah 2018. Semarang.
- BPS Provinsi Jawa Tengah, 2020. Profil Tempat Tinggal Provinsi Jawa Tengah 2019. Semarang.
- BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021. Profil Tempat Tinggal Provinsi Jawa Tengah 2020. Semarang.
- BPS Provinsi Jawa Tengah, 2018. Statistik Pendidikan Provinsi Jawa Tengah 2017. Semarang.
- BPS Provinsi Jawa Tengah, 2019. Statistik Pendidikan Provinsi Jawa Tengah 2018. Semarang.
- BPS Provinsi Jawa Tengah, 2020. Statistik Pendidikan Provinsi Jawa Tengah 2019. Semarang.
- BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021. Statistik Pendidikan Provinsi Jawa Tengah 2020. Semarang.
- BPS Provinsi Jawa Tengah, 2017. Statistik Sosial dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah Hasil Susenas 2016. Semarang.
- BPS Provinsi Jawa Tengah, 2018. Statistik Sosial dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah Hasil Susenas 2017. Semarang.
- BPS Provinsi Jawa Tengah, 2019. Statistik Sosial dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah Hasil Susenas 2018. Semarang.
- BPS Provinsi Jawa Tengah, 2020. Statistik Sosial dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah Hasil Susenas 2019. Semarang.
- BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021. Statistik Sosial dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah Hasil Susenas 2020. Semarang.
- BPS Provinsi Jawa Tengah, 2022. Statistik Sosial dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah Hasil Susenas 2021. Semarang.

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

<https://tegalkota.bps.go.id>



BADAN PUSAT STATISTIK KOTA TEGAL

Jl. Nakula No.36 A Tegal 52124

Telp/Fax. (0283) 351593

E-mail : bps3376@bps.go.id

Homepage : <http://tegalkota.bps.go.id>